

PENDAMPINGAN KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN  
**KEBAKARAN**  
**HUTAN DAN LAHAN**  
DI DESA GELEBAK DALAM KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Yenrizal, M.Si

Prof. Dr. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D

**PENDAMPINGAN KOMUNITAS  
DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN DI DESA GELEBAK  
DALAM, KABUPATEN BANYUASIN**

**Dr. Yenrizal, M.Si**  
**Prof. H.M. Sirozi, M.A.,Ph.D**

**RAFAH**press  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMA PALEMBANG

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan  
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana**

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia**

**Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PENDAMPINGAN KOMUNITAS**

**DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA  
GELEBAK DALAM, KABUPATEN BANYUASIN**

Penulis : Dr. Yenrizal, M.Si  
Prof. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D  
Layout : Tri Septiana Kebela  
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

**CV. Amanah**

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I: Januari 2020

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN: 978-623-250-135-5

## KATA PENGANTAR

Munculnya gagasan melakukan riset tentang pendampingan komunitas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini, tak lepas dari fenomena meningkatnya kasus karhutla setiap tahun di Indonesia. Sumatera Selatan khususnya menjadi salah satu daerah sebagai sumber utama terjadinya karhutla yang kemudian berdampak pada terjadinya kabut asap yang memapar banyak daerah bahkan sampai ke luar negeri. Persoalan karhutla kemudian menjadi isu nasional yang terkesan rumit untuk dipecahkan.

Karhutla memang tidak hanya di Sumsel saja, terdapat juga sumber lain seperti di Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan, dan Papua. Tetapi fenomena yang terjadi umumnya sama, yaitu daerah yang dominan rawa mineral dan rawa gambut. Selama ini cenderung disalahkan bahwa penyebab karhutla adalah aktifitas masyarakat yang membakar dan membuka lahan pertanian. Dalam beberapa sisi ini memang tidak salah, banyak fenomena yang menjadi bukti masalah ini. Tetapi sebenarnya karhutla bukan hanya karena aktifitas masyarakat semata, terlibat juga disini unsur perusahaan dan bahkan pemerintah daerah selaku pengendali dan pembuat kebijakan.

Buku ini adalah hasil riset yang mencoba memahami dan melihat sudut pandang masyarakat sekaligus melakukan pendampingan terhadap komunitas masyarakat, khususnya di satu desa yang selama ini menjadi sumber karhutla yaitu Desa Gelabak Dalam, Sumatera Selatan. Hasil riset ini kemudian menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya bisa dikelola dan diberdayakan untuk mencegah terjadinya karhutla. Melalui berbagai program pendampingan yang bersifat partisipatif, kemandirian dan kesadaran masyarakat bisa digalang dan dimunculkan, yang kemudian menjadikan desa Gelebak Dalam menjadi desa bebas karhutla di 2019.

Tentu saja riset ini, sebagai sebuah kajian akademik, tidak luput dari kekurangan. Dialektika intelektual tentu penting disini, kekurangan adalah bahan untuk perbaikan masa berikutnya. Oleh

karena itu, terimakasih yang tak terhingga kepada narasumber yang sudah terlibat dalam proses ini, khususnya Kepala Desa Gelebak Dalam beserta seluruh jajarannya dan warganya. Terimakasih juga kepada pihak yang telah berpartisipasi, seperti LP2M UIN Raden Fatah dan jajarannya, atas dukungan kebijakan riset. Rasa terimakasih tentunya disampaikan kepada seluruh narasumber yaitu para rektor dan jajarannya yang telah berbagi informasi. Tak lupa tentunya semua pihak, keluarga besar UIN Raden Fatah yang turut membantu.

Tak ada gading yang tak retak, kritik dan saran untuk perbaikan edisi berikutnya sangat dinantikan.

Palembang, Oktober 2019

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Awal Wilayah Dampungan .....	6
C. Tinjauan Riset Sebelumnya.....	8
D. Output Kegiatan.....	12
E. LuaranKegiatan.....	12
F. Kerangka Konseptual .....	12
G. Metode Pendampingan .....	15
<b>BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA).....</b>	<b>19</b>
A. Pemberdayaan Masyarakat .....	19
B. Pendampingan Komunitas .....	26
C. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) .....	32
<b>BAB III DESA GELEBAK DALAM, DARI MASALAH MENUJU SEJAHTERA.....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah dan Budaya Desa Gelebak Dalam .....	45
B. Tradisi Membakar Lahan .....	47
C. Teknologi Bios 044 dan Pencegahan Karhutla .....	49
D. Kemandirian Air Bersih .....	51
E. Teknologi Pertanian .....	55
F. Ekowisata .....	56
<b>BAB IV PETA JALAN (ROAD MAP) PENDAMPINGAN .</b>	<b>59</b>
A. Pengenalan Masalah .....	60

B.	Peleburan dengan Komunitas Gelebak Dalam .....	63
C.	Menguraikan Identifikasi Masalah Bersama Komunitas .....	70
D.	Menentukan Alternatif Solusi .....	76
E.	Penerapan Solusi .....	84
<b>BAB V</b>	<b>CAPAIAN PENDAMPINGAN .....</b>	<b>89</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A.	Kesimpulan .....	99
B.	Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>101</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>.....</b>	<b>106</b>
<b>GLOSARIUM</b>	<b>.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Areal persawahan desa geledak dalam .....	7
Gambar 2. Suasana desa geledak dalam .....	8
Gambar 3. Kondisi persawahan di desa geledak dalam .....	46
Gambar 4. Peristiwa karhutla yang terjadi di 2015 .....	48
Gambar 5. Lahan sawah yang sudah ditaburi BIOS 44 .....	50
Gambar 6. Anak-anak di Desa Gelebak Dalam yang setiap hari bermain tak jauh dari air. Foto Nopri Ismi/Mongabay Indonesia .....	52
Gambar 7. Hendri Sani, kepala Desa Gelebak Dalam, di depan teknologi Filter Air Nusantara. Dia bercita mewujudkan desanya menjadi desa mandiri. Misalnya di masa mendatang tidak lagi tergantung dana desa. Foto Nopri Ismi/Mongabay Indonesia .....	53
Gambar 8. Perbandingan kandungan logam air mineral yang dijual umum dan air mineral yang dihasilkan Bumdes Maju Bersama 044 di Desa Gelebak Dalam. Foto Nopri Ismi/Mongabay Indonesia .....	54
Gambar 9. Ekskavator milik Desa Gelebak Dalam .....	60
Gambar 10. Lahan pertanian dan potensi ikan di perairan rawa, aset ekowisata yang potensial untuk dikembangkan .....	58
Gambar 11. Peleburan diri dengan komunitas, bagian dari upaya untuk memahami partisipasi warga.....	66
Gambar 12. Melihat langsung lokasi rawan karhutla, termasuk pada wilayah persawahan, sekaligus mendiskusikan simulasi pencegahan.....	73
Gambar 13. Meninjau Lokasi Karhutla .....	74
Gambar 14. Peninjauan lokasi dan pembuatan lubang penimbunan bekas penebangan .....	75
Gambar 15. Diskusi informal dengan anggota masyarakat .....	80
Gambar 16. Diskusi Merangking Masalah .....	82
Gambar 17. Lokasi Rawan Karhutla .....	83
Gambar 18. Suasana Desa Gelebak Dalam setelah pendampingan .....	92
Gambar 19. Suasana Desa Gelebak Dalam setelah pendampingan .....	92



Gambar 20. Suasana Desa Gelebak Dalam setelah pendampingan .....	94
Gambar 21. Suasana Desa Gelebak Dalam setelah kebakaran .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan adalah fenomena yang terus berulang. Sejak peristiwa karhutla 2014 lalu, berlanjut ke 2015, dan terus terjadi di 2016, 2017, 2018, dan 2019. Setiap kali kemarau datang, bisa dipastikan beberapa kawasan di daerah ini sudah terbakar. Data dari BNPB menyebutkan bahwa luas kawasan terbakar mencapai 1,2 juta hektar di tahun 2015 dan tahun 2019 sudah mencapai hampir 1 juta hektar. Dominan dari kawasan terbakar ini ternyata adalah daerah rawa gambut.

Efek terjadinya karhutla adalah menebalnya kabut asap yang melanda berbagai wilayah, termasuk ke Palembang dan beberapa daerah terdekat. Bahkan pada 2015 lalu, Singapura dan Malaysia juga terkena imbasnya. Sumatera Selatanpun dikenal dengan julukan provinsi pengekspor asap. Karena itu, tak heran jika di tahun 2015, Presiden Jokowi bahkan menyempatkan diri untuk berkantor di Kabupaten OKI selama beberapa hari, khususnya memantau upaya pemadaman api sekaligus melihat penyebab terjadinya kebakaran.

Dalam skala luas, terjadinya karhutla sebenarnya bukan hanya dialami Sumsel. Tercatat setidaknya ada 4 provinsi prioritas utama yaitu Sumsel, Riau, Kalbar, dan Kalteng. Prioritas ini didasarkan pada luasan wilayah gambut terbakar. Tetapi dalam faktanya, karhutla yang terjadi tidak hanya di daerah tersebut, banyak wilayah lain juga ikut terbakar, seperti Jambi, sebagian Lampung, Kalimantan Selatan, dan Papua. Semua daerah yang memiliki wilayah gambut, hampir semuanya terbakar.

Sumsel sendiri termasuk daerah yang paling banyak mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Perpres No. 1 tahun 2016, dua kabupaten di Sumsel yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Banyuasin dijadikan sebagai wilayah prioritas restorasi gambut. Ini bukan tanpa alasan karena fenomena karhutla tahun 2015 menimbulkan efek yang luar biasa ke seluruh komponen masyarakat.

Penyebab terjadinya karhutla bisa diidentifikasi sebagai berikut<sup>1</sup>, *pertama*, metode pembukaan lahan pertanian yang masih mengandalkan metode pembakaran. Umumnya ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang ingin membuka lahan pertanian. *Kedua*, penelantaran lahan-lahan, terutama kawasan gambut, lahan tidak diolah dan tidak dijaga. Lahan-lahan ini umumnya adalah rawa-rawa (sebagian rawa gambut), yang di musim kemarau sangat rentan untuk terbakar. *Ketiga*, tingginya suhu akibat kemarau panjang. Kemarau ini lazim disebut sebagai fenomena *el nino*, yang menimbulkan kemarau sampai 4-6 bulan berturut-turut. *Keempat*, keringnya rawa-rawa, terutama rawa gambut, baik akibat tindakan yang disengaja atau tidak. Rawa gambut sebenarnya menjadi cadangan air, dan di musim kemarau saat rawa ini kering maka akan berpotensi terbakar. *Kelima*, praktek *illegal logging* yang masih banyak ditemukan. Penebangan hutan secara liar, pengurangan tutupan hutan, kemudian menjadi kayu bakar di saat musim kemarau. Selain itu, masalah non teknis juga ikut berpengaruh seperti soal koordinasi antar instansi yang tidak maksimal dan sikap mental sebagian pihak yang tidak berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Begitu juga soal kebijakan yang tidak tegas dan jelas dalam perlindungan kawasan resapan air, termasuk pula upaya penegakan hukum yang kerap kurang berimbang dan kurang konsisten.

Salah satu daerah di Sumsel yang rentan terbakar adalah Desa Gelebak Dalam di Kabupaten Banyuasin. Daerah ini memang didominasi oleh rawa-rawa, baik rawa gambut maupun rawa tanah mineral. Luas wilayah ini mencapai sekitar 3000 ha. Saban tahun desa ini selalu menjadi langganan terjadinya karhutla. Tahun 2014 dan 2015, karhutla selalu mendera kawasan ini. Penyebabnya adalah lahan yang terlalu kering dan aliran air yang sulit. Desa Gelebak Dalam adalah desa yang sumber mata pencaharian utama dari pertanian padi sawah, oleh karena itu keberadaan lahan sangat dibutuhkan. Akan tetapi di musim kemarau, lahan-lahan sawah ini kering dan sangat potensial terjadinya karhutla. Inilah yang menjadi masalah serius bagi warga setempat, disatu sisi mereka memiliki ketergantungan terhadap lahan, namun disisi lain memiliki keterbatasan untuk mendistribusikan air ke lahan-lahan yang ada.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh warga dan pemerintah desa setempat guna mencegah terjadinya karhutla. Tahun 2016, Pemerintah Desa setempat menjalin kerjasama dengan Korem 044 Garuda Dempo guna melakukan berbagai upaya

---

<sup>1</sup> Laporan Satgas Karhutla Sumatera Selatan, tahun 2016

pemberdayaan masyarakat untuk bisa aktif menjaga lahannya. Tetapi fakta karhutla tetap berpotensi terjadi. Program pembangunan irigasi juga dilakukan untuk membantu pengairan sawah warga, tetapi tetap saja karhutla timbul. Pola penegakan hukum dengan jalan patroli dan penindakan juga dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Diperlukan kemudian upaya-upaya lain yang mengarah pada posisi dan kondisi warga pada sebuah wilayah, yang menempatkan mereka mampu untuk melakukan aktifitas rutin namun tetap dalam konteks penjagaan lingkungan dari ancaman karhutla. Pendampingan komunitas adalah satu hal yang bisa dilakukan, dengan tekanannya bersama-sama warga menciptakan formula baru agar aktifitas yang ada tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Riset dari Priyo Subekti, Yanti Setianti, dan Hanny Hafiar<sup>2</sup> menunjukkan bahwa pendampingan komunitas adalah sesuatu yang diperlukan yang tekanannya adalah pemberdayaan berbasis potensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Riset yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa banyak hal yang bisa dikembangkan untuk menghindarkan masyarakat dari perilaku merusak kondisi alam, diantaranya pemberdayaan mata pencaharian alternatif yang bisa dilakukan.

Sebuah kajian dari IRE Institute<sup>3</sup> memperlihatkan pula bahwa pendampingan komunitas atau sering disebut sebagai pemberdayaan komunitas, memang diperlukan, kendati dalam beberapa sisi masih menemukan banyak tantangan dan kendala, diantaranya adalah peran aktor yang tidak sinergis, ketersediaan sarana prasarana, sampai pada muatan kebijakan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, pendekatan asimetris diperlukan, yaitu pendekatan yang berpihak pada kondisi nyata dari sebuah komunitas.

Sementara Irkham Widiono dan Sarmin<sup>4</sup> mengatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan masyarakat (dalam hal ini peternak) dalam menerapkan sistem pertanian peternakan terpadu. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan pengetahuan dan kecakapan warga dalam budi daya ternak, budi daya tanaman, dan pengelolaan limbah. Pengembangan

---

<sup>2</sup> Priyo Subekti, Yanti Setianti, dan Hanny Hafiar, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Kawistara, Volume 8 No 2, Agustus 2018

<sup>3</sup> Abdul Rozaki, 2016, Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia, Policy Paper, IRE, Yogyakarta

<sup>4</sup> Irkham Widiono dan Sarmin, Pemberdayaan Peternak Marginal: Studi Kasus di Wilayah Banguntapan Bantul, Indonesian Journal of Community Engagement Vol. 02, No. 02, Maret 2017

masyarakat dilakukan dengan pendekatan partisipasi aktif masyarakat (pembelajaran berpusat pada petani peternak) dan pendampingan oleh pakar serta praktisi pertanian peternakan terpadu. Selain itu, pengembangan kelembagaan dan jejaring kerja sama juga dilakukan dengan berbagai pihak terkait. Semuanya dilakukan berbasiskan pada potensi dan kemampuan lokal dalam melakukan hal tersebut.

Kajian tentang aktifitas pendampingan pada konteks masyarakat rentan karhutla masih sangat minim. Tetapi proses dan mekanisme dampingan sifatnya tidak jauh berbeda, perbedaan hanya pada lokus kajian dan karakteristik permasalahan.

Berbagai riset sudah menunjukkan bahwa persoalan karhutla memang sangat rumit dan sulit diselesaikan. Masalah yang mengemuka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di antaranya kesulitan dalam koordinasi antar lembaga terkait (Subarudi, 2002; Simorangkir & Sumantri, 2002); belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab di antara lembaga yang sesuai (Subarudi, 2002; Simorangkir & Sumantri, 2002), bentuk kelembagaan bersifat ad hoc (Simorangkir & Sumantri, 2002), kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum terpadu (Simorangkir & Sumantri, 2002), lemahnya penegakan hukum (Subarudi, 2002; Simorangkir & Sumantri, 2002), dan anggaran terbatas (Novra & Fazrias, 2008). Adapun lembaga formal yang dibentuk pemerintah menanggulangi kebakaran belum efektif sementara di desa telah terbentuk regu-regu pencegahan kebakaran hutan (Akbar, 2012). Adapun keberadaan Manggala Agni dan Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis masih terbatas (Saharjo & Yungan, 2014). Terkait dengan lembaga pengendalian Karhutla, Thoaha (2014) menyatakan di daerah perlu dikembangkan sistem peringatan dini Karhutla berbasis masyarakat.

Sebuah riset dari Meiwanda<sup>5</sup> yang melihat pengendalian karhutla di Riau mengatakan bahwa faktor-faktor tantangan dalam pengendalian karhutla, terutama di Riau bisa dibedakan menjadi dua yakni, jenis tanah gambut dan perubahan iklim. Pertama, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan struktur lahan lebih dari 50 persen lahan gambut wilayah pulau Sumatera. Penggolongan lahan gambut dikategorikan menjadi tiga kelompok kondisi gambut yaitu lahan gambut tidak tergenang permanen dalam kondisi asli, lahan gambut tidak tergenang permanen dan dimanfaatkan serta lahan non-gambut (tanah mineral). Provinsi Riau didominasi lahan gambut tidak tergenang

---

<sup>5</sup> Geovani Meiwanda, *Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, Nomor 3, Maret 2016

permanen, yang dimanfaatkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, lahan pertanian dan lain-lain. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi di Riau. Perkiraan bahwa faktor ekonomi memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim. Hal ini merupakan bentuk singgungan yang ditujukan kepada pembuat kebijakan mengenai pentingnya hubungan antara hutan dan iklim. Di Indonesia strategi pembangunan hutan lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi<sup>6</sup>. Faktor geografis yaitu jarak antar kabupaten di Riau yang berjauhan, menjadi tantangan tersendiri terlebih ketika keterbatasan alat tidak mendapatkan solusi.

Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman awal bahwa masyarakat memiliki keterkaitan dengan lingkungan alamnya, punya relevansi pula terhadap terjadinya karhutla, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencegah terjadinya karhutla. Fokus yang harus dilakukan adalah bagaimana upaya pemberdayaan komunitas masyarakat desa Gelebak Dalam agar lebih peduli dan lebih waspada terhadap terjadinya karhutla. Terpenting adalah bagaimana menciptakan komunitas yang sadar karhutla dan sadar dengan kekuatan lingkungannya.

### **Kondisi Awal Wilayah Dampungan**

Desa Gelebek Dalam yang menjadi fokus wilayah dampungan berada di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Jumlah penduduk mencapai 2.100 jiwa, 542 KK, luas lahan sekitar 800 ha untuk pemukiman dan persawahan, sisanya masih belum diolah atau sudah dijadikan kebun karet. Kondisi perekonomian warga berada pada level menengah dengan penghasilan dari padi sawah sekitar 6.700 ton per tahun atau Rp. 55 milyar/tahun. Daerah ini memang dikenal sebagai sentra padi di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, mata pencaharian warga desa umumnya adalah bertani sawah.

Lahan persawahan memang terlihat sangat luas dan sudah sebagian besar dimanfaatkan. Hanya saja, kendati daerah ini adalah daerah persawahan, tetapi pada musim kemarau, Gelebek Dalam seringkali menjadi lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tahun 2014, 2015 dan sebagian kecil juga terjadi di 2016, 2017 dan 2018, kebakaran melanda desa ini. Hal ini sangat dimungkinkan karena sebagian lahan

---

<sup>6</sup> Nandika, Dodi. (2005). Hutan Bagi Ketahanan Nasional. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

masih belum diolah, sebagian lagi juga berupa rawa gambut dangkal. Titik api sangat potensial untuk terjadi di lokasi ini.

Sampai saat ini, usaha yang sudah dilakukan warga menghadapi musim kemarau dan mencegah terjadinya api, memang belum tampak maksimal. Beberapa warga masih melakukan metode tebas bakar (sonor) karena memang cara ini sangat efektif dalam membuka lahan. Efektif dalam artian mudah dan berbiaya murah.

Sektor pertanian sawah memang menjadi sumber mata pencaharian utama warga desa. Mereka mengandalkan persawahan sistem tadah hujan, sebagian saat ini sudah mulai menggunakan irigasi, yang pembuatannya dilakukan sendiri oleh warga dengan alat berat yang dimiliki. Beberapa warga juga melakukan usaha perkebunan karet kendati tidak dikelola maksimal karena beberapa kebun terlihat terlantar atau tidak dikelola secara serius.

Gambaran sekilas mengenai Desa Gelebak Dalam, khususnya areal persawahan yang ada, bisa dilihat dari gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Areal Persawahan Desa Gelebak Dalam

Areal persawahan diatas adalah tulang punggung dan urat nadi bagi masyarakat, sementara pada musim kemarau, sawah ini tak bisa diolah sama sekali, hanya menjadi hamparan tanah tandus yang tak bisa diolah dan punya nilai apa-apa.

Oleh karena itu, persoalan karhutla menjadi perhatian serius yang harus dilakukan karena akan berkaitan dengan berbagai masalah turunannya. Besarnya luasan karhutla akan menyebabkan masalah asap ke kota Palembang dan daerah lainnya, bahkan sampai ke negara tetangga.

Kendala utama yang dihadapi warga terhadap karhutla ini adalah adanya masalah antara membuka lahan dengan larangan membakar lahan. Sampai saat ini warga belum menemukan metode efektif, kendati berbagai inovasi sudah diterapkan, seperti melakukan kerjasama dengan pihak TNI, BNPB, Kepolisian dan juga dengan SKPD terkait. Sampai sekarang usaha ini belum membuahkan hasil maksimal. Setiap kemarau datang, kekhawatiran itu selalu muncul.

Sementara itu jika dilihat dari posisi desa, lokasi ini berdekatan dengan Palembang bahkan bisa dikatakan sebagai wilayah penyangga. Jarak dari pusat kota hanya sekitar 15 km dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Oleh karena itu akses menuju desa ini bisa dikatakan sangat mudah.



Gambar 2. Susasana Desa Gelebak Dalam



Melalui akses desa yang mudah dan bisa dicapai ini, maka desa ini sebenarnya adalah desa yang terbuka, begitu juga masyarakatnya. Akses transportasi, komunikasi, dan lainnya bisa masuk dengan baik. Sektor pendidikanpun juga menunjukkan perkembangan yang baik, dimana anak-anak Gelebak Dalam memiliki tingkat pendidikan yang baik, umumnya tamat SMU dan banyak yang kemudian meneruskan ke pendidikan tinggi.

### **Tinjauan Riset Sebelumnya**

Kajian mengenai program-program pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat, bisa dikatakan sudah cukup sering dilakukan. Program-program ini mengarah pada penguatan dan pengembangan sebuah komunitas, baik yang menjadi kajian partisipatif maupun yang bersifat normatif. Beberapa riset terdahulu yang bisa dijadikan sebagai acuan awal dalam melihat masalah ini adalah :

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali) oleh Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, Muhamad. Dipublikasikan di Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 23 nomor 1 tahun 2017. Riset ini menekankan bahwa pengembangan desa wisata yang dikhawatirkan akan mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu dilakukanlah usaha pendampingan, agar adanya program desa wisata, tidak akan menghilangkan atau justru mengaburkan makna tersebut
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah, oleh Siti Zuliyah, *Journal of Rural and Development*, Edisi Juni 2016. Riset menekankan pada aspek masyarakat desa, dengan asumsi bahwa masyarakat desa adalah kelompok yang memang memerlukan pemberdayaan khusus. Sebenarnya sudah cukup banyak kajian riset tentang masyarakat desa ini, tetapi formula demi formula memerlukan kajian lebih lanjut.
3. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji, oleh Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati. Universitas Padjadjaran, November 2017. Riset ini menekankan bahwa program desa wisata memang memerlukan keterlibatan

masyarakat lokal, dan hasil riset ini menunjukkan bahwa pola-pola yang beranjak dari keterlibatan dan partisipasi masyarakat adalah kata kunci terpenting.

4. Karanganyar Hijau sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karanganyar, oleh Winar Nur Aisyah Fatimah, Jurnal CARE Jurnal Resolusi Konflik, CSR, dan Pemberdayaan, Juni 2016, Vol. 1 (1). Hasil riset ini yang mengarah pada pelibatan masyarakat dalam mendorong dan mensukseskan program Karang Anyar Hijau. Metode-metode khusus diterapkan seperti mencari peluang dan kemungkinan pelibatan masyarakat secara khusus dan terencana. Partisipasi masyarakat hanya bisa diwujudkan jika ada keterlibatan yang konkrit dari semua pihak.
5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul oleh Dinar Wahyuni. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Volume 9, No. 1 Juni 2018. Kajian ini menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting yang didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki. Pola-pola partisipasi harus didorong dan diarahkan pada peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat.
6. Pendampingan Dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) oleh Heri Budiyo, Jurnal Local Wisdom, Volume: III, Nomor: I, Halaman: 34 - 40, Februari 2011. Kajian ini membahas mengenai proses perencanaan dalam kaitan penataan lingkungan permukiman. Hasil ini menyebutkan bahwa kearifan budaya lokal dalam pembangunan permukiman di pedesaan menjadi penting sebagai upaya untuk mengeliminir kesenjangan budaya dalam proses membangun. Penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di desa gudang merupakan contoh kasus pentingnya memahami kearifan lokal dalam proses membangun komunitas.

Beberapa tinjauan riset sebelumnya di atas, lebih banyak menggunakan kajian ilmu sosiologi, hukum dan kebijakan publik. Sementara riset yang dilakukan ini lebih mengarah pada pendekatan-pendekatan partisipatif dengan memadukan sisi *action research*, ilmu ekologi, pertanian, dan komunikasi. Pendekatan ilmu komunikasi diperlukan karena sisi penggalangan partisipasi masyarakat harus dimulai dengan pendekatan komunikasi yang partisipatif.

Pendekatan komunikasi lingkungan sebagai basis dalam melihat bagaimana pemaknaan manusia tentang lingkungan sekitar menjadi penting sekali.

Ahimsa-Putra (2004: 38) menjelaskan bahwa lingkungan atau *environment* secara garis besar dapat dibedakan berdasarkan (1) sifat atau keadaannya dan (2) asal-usulnya. Lingkungan berdasarkan sifat dapat dipilah lagi menjadi (Yenrizal, 2015):

1. Lingkungan fisik yang berupa benda-benda di sekitar manusia, makhluk hidup, dan segala unsur-unsur alam:
2. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk disini perilaku-perilaku manusia atau pelbagai aktivitas sosial yang berupa interaksi antarindividu serta berbagai aktivitas individu: dan
3. Lingkungan budaya. Lingkungan ini mencakup pandangan-pandangan, pengetahuan, norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Sedangkan, lingkungan yang dilihat dari asal-usulnya berupa:

1. Lingkungan alami (*natural environment*), di mana lingkungan jenis ini memiliki pengertian keseluruhan unsur di luar diri manusia yang bukan ciptaan manusia.
2. Lingkungan buatan (*man made environment*) yakni lingkungan yang merupakan hasil kreasi manusia.

Gagasan Ahimsa Putra dapat pula dihubungkan dengan pendapat dari Otto Soemarwoto. Dikatakan oleh Soemarwoto (2004) bahwa manusia sebagai salah satu organisme hidup, tidak dilihat dalam isolasi, terpisah dari dan berada di atas alam, melainkan bagian dari dan berada di alam semesta. Ada kesatuan hubungan, yang disebut sebagai sebuah ekosistem. Seluruh benda dan keadaan yang terdapat di dalam ruang yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup mesti kita artikan secara luas, yaitu tidak hanya sekedar untuk lingkungan biologi dan fisik akan tetapi juga untuk lingkungan budaya, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Penjelasan Soemarwoto ini meluaskan makna lingkungan yang tidak lagi sekedar definisi dari ilmuwan fisik belaka.

Pada penjelasan ini, ada indikasi kuat bahwa dalam memahami lingkungan, apabila salah satu unsur terganggu maka gangguan akan dirasakan pula oleh unsur lainnya. Amanat yang dibebankan Tuhan atas manusia bukanlah untuk menaklukkan alam serta mengeksploitasinya, akan tetapi kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi

alam agar senantiasa dapat dimanfaatkan oleh manusia yang lain (Yenrizal, 2015). Mahatma Gandhi pernah berkata, “Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak (Husen, 2007). Keterkaitan manusia dengan alam adalah sesuatu yang memang mendasar, bahkan dari sudut pandang agama juga menjadi titik fokus.

Tidak hanya itu, keterkaitan manusia dengan alam kemudian menunjukkan ritmenya tersendiri, yang dalam bahasa Sosiologi Lingkungan disebut dengan manusia yang tunduk pada aturan alam. Segala perilaku manusia ditentukan oleh perkembangan dan dinamika alam semesta tersebut.

### **Output Kegiatan**

Pendampingan ini diharapkan akan memberikan output berupa :

1. Tercapainya kelompok masyarakat yang sadar akan bencana dan peduli dengan kelestarian dan keutuhan lingkungannya
2. Terciptanya kelompok masyarakat yang cepat tanggap dan kreatif dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk mencegah terjadinya karhutla

### **Luaran Kegiatan**

1. Didapatnya sebuah model pemberdayaan masyarakat yang tangguh bencana dan peduli lingkungan, khususnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan.
2. Publikasi hasil kegiatan melalui Jurnal Ilmiah Terindeks
3. Publikasi hasil kegiatan melalui penerbitan buku ber ISBN

### **Kajian Konseptual**

Pendampingan komunitas akan merujuk pada konsep pemberdayaan masyarakat. Hal ini dengan asumsi bahwa mendampingi komunitas adalah melakukan pemberdayaan terhadap komunitas tersebut. Darwanto<sup>7</sup> mengatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada

---

<sup>7</sup> [https://www.bappenas.go.id/files/5113/5078/6523/07herry\\_\\_20091014132804\\_\\_2268\\_\\_0.doc](https://www.bappenas.go.id/files/5113/5078/6523/07herry__20091014132804__2268__0.doc)

tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Lebih lanjut, dijelaskan lagi oleh Darwanto<sup>8</sup> bahwa unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan.

Ada berbagai bentuk partisipasi<sup>9</sup>, yaitu:

- secara langsung,
- dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat),
- secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka),
- berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan),

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> ibid

- o berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistis, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dll. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah.

Pendapat Darwanto di atas bisa dijadikan sebagai rujukan awal untuk melihat bagaimana melakukan pendampingan komunitas di Desa Gelebak Dalam, khususnya dalam penanganan masalah karhutla. Partisipasi adalah kunci terpenting, disamping kreatifitas yang harus pula dimunculkan.

Selain itu, pendekatan komunikasi partisipatif dengan model-model yang mengarah pada luaran kegiatan juga diperlukan. Pendapat dari Santoso Hamijoyo (2002) mengatakan bahwa dalam konteks komunikasi partisipatif, keterlibatan dan kesamaan pemahaman antara masing-masing pihak sangat diperlukan. Komunikasi partisipatif menjadi penting karena simbol-simbol dalam masyarakat harus dipahami bersama dalam konteks pelibatan mereka. Ini juga mengarah pada kesamaan pemahaman secara simbolik sebagaimana ditegaskan oleh Littlejohn (1999) mengenai pendekatan sosio kultural dalam keilmuan komunikasi.

Munculnya makna lingkungan, akan berkorelasi pula dengan posisi manusia disekitarnya. Terjadilah interaksi, terjadi pemahaman dan berlangsunglah hubungan yang dalam versi AT Rambo (1984) disebut sebagai hubungan antara ekosistem yang ada, membentuk sebuah kesepahaman tersendiri. Ini mempertegas bahwa manusia hakekatnya adalah makhluk yang memaknai lingkungan sekitarnya.

Mead (1967) berkata bahwa manusia adalah makhluk yang simbolik. Manusia memproduksi simbol, memaknai simbol, dan mentransformasikan simbol dalam proses komunikasinya. Simbol itu sendiri bersifat manasuka, sembarang, dan sangat tergantung konteks masyarakatnya. Semua orang, masyarakat, dengan ragam budayanya, punya

kebebasan untuk memberikan makna-makna tersendiri terhadap apa yang ada disekitarnya. Kebenaran makna ada pada komunitas tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa berkomunikasi bukanlah tindakan yang sekedar linear atau satu arah belaka. Berkomunikasi adalah aktifitas yang sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek. Faktor kejiwaan, faktor ruang dan waktu, faktor budaya, termasuk faktor lingkungan, sangat mempengaruhi.

Salah satu perspektif penting dalam keilmuan komunikasi adalah transaksional (Barlund, 1970). Tekanannya adalah mekanisme komunikasi yang mengedepankan aspek dua arah, berkelanjutan, dan tidak ada titik berhenti. Antara masing-masing pelaku komunikasi memiliki tanggungjawab yang sama, aktif, dan berperan dalam menentukan keberhasilan proses yang terjadi. Intinya, pelaku komunikasi adalah komponen yang aktif.

Istilah transaksi mengisyaratkan bahwa pihak yang berkomunikasi berada dalam keadaan interdependensi atau timbal balik, eksistensi satu pihak ditentukan pihak lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa semua unsur dalam proses komunikasi saling berhubungan. Persepsi seorang peserta komunikasi saling bergantung dengan persepsi orang lain terhadap dirinya, bahkan tergantung pula konteks lingkungannya (Mulyana, 2003:68).

Beberapa aspek tersebut di atas akan menjadi sarana panduan dalam melihat dan mengetahui bagaimana pola-pola partisipatif ditekankan dan kemudian diarahkan pada pencegahan karhutla di wilayah kajian. Pendekatan komunikasi, sosiologi, lingkungan, semua menjadi bahan dalam melihat bagaimana masyarakat memaknai lingkungannya dan kemudian melakukan aktifitas tersendiri.

### **Metode Pendampingan**

Wilayah desa Gelebek Dalam bukanlah daerah bagi peneliti. Pengetahuan peneliti tentang lokasi ini sudah cukup baik, dalam arti kata metode *gaining acces* tidak diperlukan lagi karena sudah ada riset awal yang dilakukan sebelumnya. Peneliti sudah memiliki hubungan baik dengan komunitas setempat, karena itu jalinan hubungan awal atau pengenalan peneliti tidak diperlukan lagi. Peneliti tinggal meneruskan fokus masalah dan kemudian melaksanakan metode-metode dampingan yang bisa dilakukan.

Secara berurutan pendampingan dilakukan dengan mengacu pada gagasan tentang riset-riset partisipatif, yang tujuannya adalah melakukan perubahan pada wilayah tersebut. Tahapan kegiatan sekaligus metode pendampingan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengenalan masalah dan pendalaman masalah

Hal ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan survey awal untuk mengetahui dan menunjukkan adanya masalah. Peneliti akan mendalami masalah dan mengenali secara lebih spesifik profil masalah tersebut.

2. Peleburan dengan komunitas

Tahapan ini adalah untuk membangun kebersamaan dan partisipasi dengan komunitas sehingga pola hubungan lebih akrab dan terpadu.

3. Menguraikan identifikasi masalah bersama komunitas

Tahapan ini dilakukan bersama sama dengan komunitas untuk menguraikan dan mengidentifikasi masalah secara rinci dan detil. Pengidentifikasian masalah akan membawa pada alternatif apa yang akan digunakan sebagai solusi.

4. Menentukan alternatif solusi masalah

Tahapan ini adalah memilih dari sekian banyak solusi, alternatif apa yang diterapkan.

5. Menerapkan alternatif solusi masalah

Bagian Ini adalah praktek dari solusi yang sudah dipilih, dilaksanakan bersama komunitas

6. Evaluasi dan refleksi

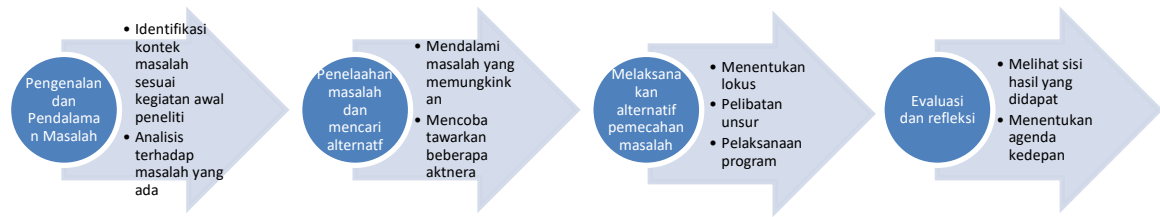
Tahap akhir ini adalah melihat dan meninjau semua hal yang sudah dilakukan dan apa kelemahan yang dialami selama ini, sehingga bisa didapatkan solusi kedepannya.

Dalam proses dampingan, jangka waktu yang dibutuhkan adalah berkisar 8 bulan dengan waktu efektif dalam proses dampingan adalah 4 bulan. Ini dengan asumsi bahwa peneliti sudah mengenal lokasi Desa Gelebak Dalam dan sudah melakukan riset awal terhadap berbagai masalah yang ditemukan.

Guna efektifitas dampingan, peneliti berkolaborasi dengan unsur lain sesuai kebutuhan. Pihak yang terlibat adalah dari kalangan ilmuwan pertanian, perikanan dan juga dari instansi penanggulangan bencana. Peneliti tetap menjadi koordinator dan unit



lain sebagai penunjang pelaksanaannya. *Road map* penelitian ini bisa dilihat dari bagan berikut.



Bagan 1. Road Map Penelitian

Tampak pada bagan di atas bahwa peta jalan penelitian ini dilaksanakan secara bertahap. Sesuai dengan konteks penelitian ini, maka peta jalan tersebut akan dilakukan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Bisa saja tahapan tersebut hanya sampai pada penentuan alternatif solusi. Pada saatnya nanti akan diteruskan dengan mencoba mencari solusi lain ataupun meneruskan pada tahap implementasi. Hanya saja tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu dampingan dan keterlibatan peneliti akan secara rutin terus dilakukan. Dalam hal ini, adanya keterlibatan peneliti selama ini, sangat menguntungkan karena peneliti sudah cukup mengenal lokasi ini.

## **BAB II**

### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)**

Istilah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan adalah bahasa lain istilah pendampingan komunitas. Komunitas akan merujuk pada satu kelompok kecil yang memiliki kesamaan karakteristik, sementara pemberdayaan masyarakat memiliki cakupan yang lebih luas, tetapi tetap pada aspek bagaimana melakukan penguatan terhadap sebuah kelompok masyarakat, bisa itu adalah desa ataupun kelompok lain. Dalam berbagai literatur, istilah pendampingan komunitas cenderung diidentikkan dengan pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Hal inilah yang akan dijelaskan dalam kajian teoritis berikut ini.

#### **2.1. Pemberdayaan Masyarakat**

Cukup banyak referensi yang membahas mengenai istilah pemberdayaan masyarakat, terutama kajian-kajian Sosiologi pedesaan. Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Aksi pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya<sup>10</sup>.

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri “menguasai sumberdaya yang menjadi milik/haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya. Intisari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa. Praktek pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan,

---

<sup>10</sup> Mustangin , Desy Kusniawati , Nufa Pramina Islami , Baruna Setyaningrum , Eni Prasetyawati, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji*, SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.1, Desember 2017

pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri<sup>11</sup>.

Sujatmiko<sup>12</sup> juga mengatakan bahwa selama ini ada bias tentang masyarakat desa. Ia mengkhususkan bahasan bahwa masih adanya pola berpikir yang mengkotak-kotakan desa sebagai kategori sektoral (bias sektoral). Bias sektoral ini menjadikan “Desa sebagai tata kelola komunitas” yang merupakan “bejana kuasa rakyat” diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang lepas dari sektor-sektor lainnya. Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung menciptakan fragmentasi kepentingan. Berhadapan dengan fakta Desa yang terfragmentasi, penerapan pemberdayaan masyarakat masih dalam skala proyek-proyek. Akibatnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat diberlakukan sebagai sebuah ”sektor” tersendiri.

Sementara itu, dalam bahasan lain dan sebuah analisis yang cukup panjang disampaikan oleh Nuryasin<sup>13</sup> bahwa pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Setidaknya terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Budiman Sujatmiko, *Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Undang-Undang Desa*, [http://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/01/Materi-Narsum-TIF-Seri-30-Pembangunan-Desa\\_Budiman-Sudjatmiko.pdf](http://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/01/Materi-Narsum-TIF-Seri-30-Pembangunan-Desa_Budiman-Sudjatmiko.pdf)

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Nuryasin, 2011, <https://grobogan.go.id/info/artikel/579-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-desa>

<sup>14</sup> Ibid.

Oleh karena itu, diperlukan juga gagasan tentang pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Nuryasin percaya bahwa pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakkampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Gagasan Nuryasin ini seakan mengatakan kuatnya stereotipe tentang masyarakat desa, yang kemudian menjadi kebiasaan dalam melihat situasi dan kondisinya.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui<sup>15</sup> :

(1) Pengembangan masyarakat,

Pengembangan masyarakat bisa dimaknai sebagai proses yang ingin membuat sebuah masyarakat menjadi lebih baik dari kondisi yang sudah. Basisnya adalah potensi yang dimiliki masyarakat tersebut. Pengembangan dilakukan karena ada asumsi bahwa masyarakat sebetulnya paham dengan apa yang dibutuhkan serta potensi yang dimiliki.

(2) Pengorganisasian masyarakat

Proses ini adalah bagian dari pengembangan, dimana semua proses bisa dilakukan andalkan pengorganisasian berjalan baik. Pengorganisasian diartikan sebagai proses mengelola masyarakat, menempatkan SDM yang ada serta menggerakkan potensi yang dimiliki.

Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

---

<sup>15</sup> Ibid.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding. Bisa juga dengan menyediakan buku-buku bacaan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan atau peminatan masyarakat. Masih banyak bentuk lainnya yang bias diupayakan.

Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah melakukan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan sikap.

Caranya adalah dengan memberikan penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merugikan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, menyetel film penerangan, dan masih banya cara lain.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Nuryasin<sup>16</sup> yakin bahwa pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin “Pendamping” sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya “Pendamping” harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat “Pendamping” meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri.

---

<sup>16</sup> Ibid.

Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri:

a. Penyadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan.

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

b. Pelatihan

Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa *pengetahuan menganggarkan kekuatan*.

c. Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir.

Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

d. Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada penyadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata “kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”.

e. Membangun Dinamika

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan

tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

Dalam bahasan lain mengenai pemberdayaan masyarakat ini, Prasojo<sup>17</sup> mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan (movement) untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD atau APBN. Program dan kegiatan tersebut harus memiliki cara kerja (metode) yang efisien dan efektif untuk memobilisasi potensi dan mengurangi dispotensi yang ada di dalam masyarakat.

Untuk itu, Prasojo<sup>18</sup> juga mengatakan bahwa bahwa strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut, Pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi, bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas.

Konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya berpangkal dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur desa berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama dan saling mengisi. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur dapat meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan tugasnya masing-masing. dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur satu lebih kuat daripada yang lainnya. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan tugas sebagai fasilitator untuk memudahkan unsur-unsur yang lain memberdayakan

---

<sup>17</sup> Prasojo, E. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4(2): 10 –24.

<sup>18</sup> Ibid.



dirinya sendiri. Untuk melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat desa, para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki kemampuan dan keterampilan terkait. Setiap unsur harus kompeten, mempunyai kemampuan dalam memahami teori dan bertindak praktis, serta dapat membuat refleksi<sup>19</sup>.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya terkait juga dengan kewenangan yang dimiliki desa, dalam hal ini mengemuka pada saat desentralisasi desa dicanangkan. Adanya dana desa yang digelontorkan pemerintah kemudian menyebabkan proses pembangunan di pedesaan haruslah berjalan secara cepat dan melibatkan partisipasi warga.

Asas desentralisasi memang kemudian memberikan dorongan pada desa untuk berdaya dan bersikap lebih maju dalam proses pembangunannya. Sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi pada akhirnya menjadi pilihan akibat ketidakmungkinan sebuah negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak untuk mengelola manajemen pemerintah secara sentralistik. Desentralisasi dalam hal ini menjadi sebuah pilihan karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebuah pembangunan. Pada perkembangan selanjutnya, desentralisasi menjadi semangat bagi negara-negara yang menyepakati demokrasi sebagai landasan gerak utamanya. Kesamaan orientasi desentralisasi dan demokratisasi inilah yang membuat sebuah pemerintahan di masa kini tidak bisa lagi memerintah secara sentralistik dan pada akhirnya terdapat kesadaran baru di kalangan para penyelenggara pemerintahan bahwa masyarakat merupakan pilar utama yang harus dilibatkan dalam berbagai formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan<sup>20</sup>.

## **2.2. Pendampingan Komunitas**

Pemberdayaan masyarakat terkait dengan aktifitas pendampingan yang dilakukan. Sebuah pemberdayaan bisa dilakukan jika aktifitas pendampingan juga

---

<sup>19</sup> Suyanto dalam Bernardus Sehan Kehik, *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)*, Agrimor 3 (1) 4-6 Jurnal Agribisnis Lahan Kering - 2018 International Standard of Serial Number 2502-1710

<sup>20</sup> Ahmad Sururi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 1 - 25

dilakukan secara intensif. Pendamping dalam pemberdayaan masyarakat antara lain kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Asisten Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Desa, Camat, atau nama pendamping lainnya. Pada dasarnya siapa saja yang berperan mendampingi masyarakat dikategorikan sebagai pendamping.

Secara garis besar pendamping masyarakat memiliki 3 peran yaitu: pembimbing, *enabler*, dan ahli<sup>21</sup>.

**Sebagai pembimbing**, pendamping memiliki tugas utama yaitu membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Disini pendamping perlu memberikan banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah mereka.

**Sebagai *enabler***, dengan kemampuan fasilitasnya pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Ketrampilan fasilitasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran ini.

**Sebagai ahli**, pendamping dengan ketrampilan khusus yang diperoleh dari lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya dapat memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan kegiatannya.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pendamping bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu pendamping perlu memberikan banyak fakta atau contoh-contoh agar masyarakat lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar.

---

<sup>21</sup> Nuryasin, Ibid.

Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat perlu menyadari, bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat. Berdasarkan peran pendamping sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi persyaratan pendamping adalah sebagai berikut :

1. Mampu membangun kepercayaan bersama masyarakat.
2. Mampu mengenali potensi masyarakat
3. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
4. Profesional dalam pendekatan kepada masy.
5. Memahami kondisi masyarakat.
6. Punya ketrampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masy.
7. Mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu :
  - Kapan meminta nasehat
  - Dimana mendapatkan nasehat tenaga ahli
  - Siapa yang harus didekati
  - Ruang lingkup tugas dari berbagai dinas
  - Sumber-sumber bantuan tambahan.

Metode pendampingan memang bukanlah bersifat seperti dokter yang akan mengobati pasien. Pendamping lebih tepat diposisikan sebagai fasilitator yang memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Peran “pendamping” bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat, dengan kata lain menjadi "fasilitator" dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan rasional. Tiap tahapan, mulai dari pengenalan persoalan dan perumusan kebutuhan, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antar pelaku pembangunan yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat), dimana seluruh proses perencanaan sekaligus merupakan proses belajar bagi tiap pihak yang terlibat. Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dalam hal ini bertindak sebagai "katalis" dan masyarakat sebagai "klien" yang diberdayakan dan

difasilitasi agar mampu berperan sebagai "pelaku utama" untuk memecahkan persoalan mereka melalui hasil kerja mereka sendiri. Ciri-ciri perencanaan yang partisipatif adalah:

- a. Bersama masyarakat merumuskan persoalan yang dihadapi · Masyarakat aktif mengambil sikap dan tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut serta menentukan cara menangani persoalan tersebut
- b. Bersama masyarakat menetapkan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk memecahkan persoalan tersebut
- c. Bersama masyarakat memutuskan rencana dan program pelaksanaan untuk mencapai tujuan pemecahan persoalan tersebut di atas.
- d. Menekankan pada upaya untuk mendorong masyarakat mengembangkan diri sendiri untuk mampu mengambil keputusan yang rasional, dan merencanakan perbaikan masa depan mereka melalui tata organisasi yang berakar dalam masyarakat<sup>22</sup>.

Terhadap hal ini, maka perlu dilihat bahwa setiap komunitas diyakini memiliki kemampuan tersendiri yang sering diistilahkan dengan modal yang dimiliki. Keberdayaan komunitas sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap unsur-unsur yang ada tersebut.

Beberapa hal yang bisa dirincikan disini adalah<sup>23</sup> :

Modal fisik (physical capital). Modal fisik adalah fasilitas atau aset yang digunakan sebagai alat dan pendukung utama terselenggaranya suatu proses usaha atau aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan seperti gedung, jalan, alat-alat, mesin, dan sebagainya. Modal fisik bisa dilihat dengan menggunakan enam indikator yaitu: (a) sarana produksi pertanian, (b) sarana dan prasarana pendidikan, (c) sarana dan prasarana kesehatan, (d) sarana dan prasarana ekonomi, (e) sarana dan prasarana komunikasi, dan (f) sarana dan prasarana transportasi. Modal Manusia (human capital).

Modal manusia adalah aset yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Modal manusia bisa diukur dengan menggunakan tiga indikator

---

<sup>22</sup> Heri Budiyo, *Pendampingan Dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plpbk)*, Jurnal Local Wisdom, Volume: III, Nomor: I, Halaman: 34 - 40, Februari 2011

<sup>23</sup> Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15-27

yaitu (a) tingkat pendidikan, (b) tingkat kesehatan dan (c) kemampuan membangun interaksi hubungan/asosiasi antarsesama.

Modal Sosial (social capital). Modal sosial adalah suatu norma atau nilai yang telah dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial/kerja yang positif, dalam rangka tercapainya tujuan bersama untuk menciptakan nilai. Indikator yang digunakan dengan menggunakan lima pertanyaan yaitu adanya (a) jaringan sosial/kerja, (b) tingkat kepercayaan antara sesama, (c) ketaatan terhadap norma, (d) kepedulian terhadap sesama, dan (e) keterlibatan dalam aktivitas organisasi sosial.

Kemampuan Pelaku Pemberdayaan. Kemampuan Pelaku Pemberdayaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelaku pemberdayaan yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat. Kemampuan pelaku pemberdayaan diukur melalui tiga aspek perilaku yaitu: (a) pengetahuan/kognitif, (b) sikap/afektif, dan (c) keterampilan/psikomotorik.

Proses Pemberdayaan. Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui (a) kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, (b) perencanaan program, (c) pelaksanaan program, serta (d) keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan.

Keberdayaan Masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek (a) kemampuan dalam pengambilan keputusan, (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

Sementara itu, Hadiyanti<sup>24</sup> mengatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin.

---

<sup>24</sup> Puji Hadiyanti, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 17, Nomor IX, April 2008.

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Dalam prosesnya perlu diperhatikan bahwa perempuan akan terlibat secara aktif. Proses pemberdayaan masyarakat didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pemberdayaan masyarakat sebaiknya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Peran utama tim pemberdayaan masyarakat adalah mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan. Peran tim pemberdayaan masyarakat pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap pertama seleksi lokasi Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait, dan masyarakat. Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan dengan sangat baik.
2. Tahap kedua sosialisasi pemberdayaan masyarakat Sosialisasi pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat pada masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian pada masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.
3. Tahap ketiga proses pemberdayaan masyarakat Tahap ini terdiri dari kegiatan: a. kajian keadaan pedesaan partisipatif, b. pengembangan kelompok, c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta d. monitoring dan evaluasi partisipatif.

Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum). Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluangnya;

- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian;
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok; dan
- d. Memantau proses dan hasil kegiatannya secara terus menerus [Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (M&EP)].

Dalam semua kegiatan, sering dimanfaatkan teknik dan alat visualisasi yang mendukung diskusi antara masyarakat dan memudahkan proses pemberdayaan. Diharapkan bahwa melalui teknik-teknik tersebut, proses kajian, penyusunan rencana kegiatan, penerapan, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara sistematis. Teknik-teknik kajian sering disebut Participatory Rural Appraisal (PRA). Monitoring dan evaluasi merupakan suatu tahap yang sangat penting dan bermaksud untuk memperbaiki proses secara terus menerus agar tujuan dapat tercapai. Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi proses, pencapaian, dan dampak proses pemberdayaan.

4. Tahap keempat pemandirian masyarakat Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Artinya, bahwa peran tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim pemberdayaan kelompok sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak tentu. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang akan berjalan terus menerus. Seringkali kegiatan memerlukan waktu dan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.

### **2.3. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)**

Banyak asumsi yang mengatakan bahwa karhutla terjadi salah satunya disebabkan oleh aktifitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan untuk membuka areal perkebunan baru. Selain itu, ada juga yang terjadi karena sikap iseng oknum yang menyebabkan lahan terbakar. Dalam asumsi lain, ada juga yang mengatakan bahwa karhutla terjadi karena adanya oknum perusahaan yang memanfaatkan masyarakat untuk

membakar lahan<sup>25</sup>. Pada kajian lain ada juga yang mengklaim bahwa ini karena faktor kebijakan yang tidak mengarah pada pencegahan karhutla<sup>26</sup>.

Apapun itu, yang jelas karhutla umumnya terjadi di wilayah pedesaan atau di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Data lain juga mengatakan bahwa karhutla umumnya terjadi karena ulah manusia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengemukakan, dari 328.724 hektar luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019 ini, 99% terjadi karena ulah manusia. Sementara dari keseluruhan luas karhutla yang terbakar 80% di antaranya telah menjadi kebun<sup>27</sup>.

Karhutla sebetulnya juga tidak hanya terjadi di Indonesia, dinegara lainpun banyak pula kasus karhutla yang terjadi di musim kemarau. Amerika, Eropa, Africa juga tidak luput dari kasus karhutla. Tahun 2019 juga banyak daerah ini yang mengalami kebakaran.

Sementara untuk Indonesia sendiri, berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai Senin, 16 September 2019, pukul 16.00 WIB, titik panas ditemukan di Riau sebanyak 58, Jambi (62), Sumatera Selatan (115), Kalimantan Barat (384), Kalimantan Tengah (513) dan Kalimantan Selatan (178). Jumlah titik panas atau hotspot itu menurun dibandingkan data BNPB per 15 September 2019, pukul 16.00 WIB. Pada Minggu kemarin, jumlah titik panas di Riau ada 59, Jambi (222), Sumatera Selatan (366), Kalimantan Barat (527), Kalimantan Tengah (954) dan Kalimantan Selatan (119). Sementara luas karhutla di Indonesia selama 2019, sesuai data KLHK, sudah mencapai 328.722 hektare. Dari data itu, kebakaran di Kalimantan Tengah tercatat seluas 44.769 hektare, Kalbar (25.900 ha), Kalsel (19.490 ha), Sumsel (11.826 ha), Jambi (11.022 ha) dan Riau (49.266 ha).

Terhadap hal ini patut dilihat bahwa karhutla sebetulnya adalah fenomena global, walaupun pada dasarnya ini bisa dicegah dan dihentikan. Keterangan dari Walhi mengatakan bahwa pasca bulan Juli 2019, saat presiden dikalahkan aliansi masyarakat sipil dalam gugatan kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, angin segar dalam upaya untuk menghentikan karhutla mulai tumbuh. Kebakaran hutan di Indonesia sendiri

---

<sup>25</sup> <https://gapki.id/news/1813/memahami-dan-mencari-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan>

<sup>26</sup> [https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-038i.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf)

<sup>27</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/bnpb-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-99-karena-ulah-manusia>



bukanlah hal yang baru, sejak beberapa dekade hutan di Indonesia kerap terbakar, salah satunya hutan yang berada di lahan gambut.

Menurut catatan dari Andres Chamorro, Susan Minnemeyer, dan Sarah Sargent dari WRI tertanggal 16 Februari 2017 dengan judul *Riwayat Kebakaran di Indonesia untuk Mencegah Kebakaran di Masa Depan*. Mengungkapkan jika di tahun 2015 merupakan periode terburuk kebakaran hutan di Indonesia, sekitar 2.6 juta hektar hutan terbakar. Mereka mengungkapkan jika penyebab kebakaran hutan dikarenakan faktor alam dan kesalahan manusia. Faktor alam diwakili oleh kondisi cuaca yang turut melatabelakangi kebakaran hutan, pasalnya di tahun 2015 merupakan fase cuaca kering akibat dari El-Nino. Dampak kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca.

Kasus kebakaran hutan mengalami penurunan pada 2017, tercatat area hutan yang terbakar hanya sekitar 165 ribu hektar. Di berbagai wilayah terutama di kawasan Sumatra, Kalimantan dan Papua mengalami tren penurunan kawasan yang terbakar. Tetapi, tren tersebut tidak bertahan lama, di tahun 2018 kebakaran hutan kembali meningkat, bahkan melebihi angka kebakaran hutan di tahun 2016. Tercatat ada sekitar 510 ribu hektar hutan yang dilahap oleh api, wilayah pulau Kalimantan mendominasi sebagai wilayah dengan titik kebakaran terluas, disusul oleh Papua. Di tahun 2019 dengan data terkumpul sampai bulan Mei, KLHK mencatatkan ada sekitar 135 ribu hektar hutan yang terbakar, dengan titik sebaran kebakaran masih didominasi wilayah Sumatra, Kalimantan dan Papua.

Walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan daripada tahun 2015, namun tren kebakaran hutan di Indonesia masih cukup tinggi, apalagi untuk di wilayah Sumatra, Kalimantan dan Papua. Pada konteks ini, Karhutla menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kelestarian hutan di Indonesia, apalagi wilayah yang kawasan hutannya terbakar merupakan hutan hujan tropis. Selain itu wilayah yang terbakar juga merupakan tempat di mana banyak alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit, tambang dan hutan monokultur yang korelasional dengan industri. Sebagai contoh di wilayah Sumatra dan Kalimantan yang merupakan surga bagi para investor sejak era orde baru. Namun baru-baru ini di wilayah Papua juga mengalami tren kebakaran hutan dan lahan

yang cukup tinggi, hal tersebut diduga sejalan dengan upaya investasi di wilayah tersebut, terutama dengan mulai dibukanya wilayah Papua untuk perkebunan sawit<sup>28</sup>.

Karhutla jelas memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat dan bagi lingkungan. Salah satu yang paling terasa adalah dampak kabut asap yang begitu mengganggu. Data dari WRI<sup>29</sup> menyebutkan kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dll), kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (ground fire), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak diatas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan.

Kebakaran hutan/lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.

#### *Terdegradasinya kondisi lingkungan*

1. Perubahan kualitas fisik gambut (penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas dan meningkatnya kerapatan lindak);
2. Perubahan kualitas kimia gambut (peningkatan pH, kandungan N-total, kandungan fosfor dan kandungan basa total yaitu Kalsium, Magnesium, Kalium, dan Natrium, tetapi terjadi penurunan kandungan C-organik);
3. Terganggunya proses dekomposisi tanah gambut karena mikroorganisme yang mati akibat kebakaran; Gambut yang sebelumnya basah menjadi kering, kemudian terbakar pula. Fungsi utama rawa gambut tidak lagi berfungsi sama sekali.

---

<sup>28</sup> <http://walhijatim.or.id/2019/08/kebakaran-hutan-dan-lahan-sebagai-konsekuensi-kerusakan-ekologi/>

<sup>29</sup> <http://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf>

4. Suksesi atau perkembangan populasi dan komposisi vegetasi hutan juga akan terganggu (benih-benih vegetasi di dalam tanah gambut rusak/terbakar) sehingga akan menurunkan keanekaragaman hayati;
5. Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run off). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat;
6. Gambut menyimpan cadangan karbon, apabila terjadi kebakaran maka akan terjadi emisi gas karbondioksida dalam jumlah besar. Sebagai gas rumah kaca, karbondioksida berdampak pada pemanasan global. Berdasarkan studi ADB, kebakaran gambut 1997 menghasilkan emisi karbon sebesar 156,3 juta ton (75% dari total emisi karbon) dan 5 juta ton partikel debu.

### *Kesehatan manusia*

Ribuan penduduk dilaporkan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan, sakit mata dan batuk sebagai akibat dari asap kebakaran. Kebakaran gambut juga menyebabkan rusaknya kualitas air, sehingga air menjadi kurang layak untuk diminum. Mengenai dampak kabut asap ini, tulisan Saharjo<sup>30</sup> mengatakan bahwa Asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terlihat seperti awan berwarna putih keabu-abuan, coklat, atau bahkan kehitam-hitaman. Semakin gelap warna asap menunjukkan konsentrasi bahan pencemarnya semakin besar, namun demikian asap putih yang terakumulasi di udara (dilapisan troposfer dekat permukaan bumi) juga dapat menimbulkan dampaknegatif langsung. Pada musim kemarau asap biasanya telah bercampur dengan uap air berupa

---

<sup>30</sup> Bambang Hero Saharjo, Lailan Syaufina, Ati Dwi Nurhayati Erianto Indra Putra, Robi Deslia Waldi Wardana, *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*, Penerbit IPB Press, Bogor.

kabut yang dihasilkan dari proses evapotranspirasi dan dehidrasi tumbuhan dari biosfer atau karena adanya lapisan inversi di atmosfer.

Kondisi udara pada umumnya mengalami turbulensi karena adanya gerak-gerakan udara (angin), namun pada saatnya terjadi pula stabilitas atmosfer. Udara dalam kondisi stabil akan mengakibatkan stagnasi dan akumulasi asap apabila terjadi kebakaran, apalagi kebakaran bahan-bahan organik yang masih agak basah seperti halnya biomassa yang berasal dari hutan, kebun, atau usaha budidaya pertanian lainnya. Massa udara yang mengandung kabut-asap akan tetap terkumpul dekat permukaan bumi dan tidak dapat bergerak lebih tinggi karena tidak terjadi gerakan udara vertikal. Sebaliknya, udara yang bergerak ke atas saat terjadi turbulensi dalam keadaan atmosfer tidak stabil akan dapat membawa dan menyebarkan asap ke udara bebas. Gejala ini sering ditandai dengan adanya awan kumulus. Secara vertikal, kabut dapat dibedakan dari awan, yang juga merupakan akumulasi uap air di udara, karena posisinya yang lebih dekat dengan permukaan bumi.

#### *Aspek sosial ekonomi*

1. Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan);
2. Penurunan produksi kayu; Kayu menjadi benda yang kemudian dilarang untuk perjualbelikan, apalagi melakukan penebangan terhadap pohon yang sudah ada. Adanya karhutla jelas kemudian membuat kayu semakin menipis.

3. Terganggunya kegiatan transportasi;

Transportasi adalah yang paling banyak terganggu, terutama transportasi udara. Di daerah-daerah yang merupakan sumber api, bisa dipastikan akan banyak yang terkena dampak dan menyebabkan penerbangan dibatalkan. Transportasi darat, laut dan sungai juga ikut terdampak. Tebalnya asap menyebabkan penglihatan terhalang oleh asap.

Selain dari hal di atas sebenarnya masih bisa dirinci lagi dampak karhutla, baik bagi manusia maupun bagi ekosistem secara keseluruhan. Semuanya memberikan dampak negatif, oleh karena itu penyelesaian masalah karhutla sebenarnya menjadi sangat penting.

Karhutla yang terparah sebenarnya terjadi kawasan rawa gambut. Karakteristik rawa ini memiliki daerah kosong didalamnya sehingga menyulitkan untuk dipadamkan jika sudah ada api. Tanah gambut merupakan tanah yang terbentuk dari akumulasi penumpukan sisa tumbuhan yang mengalami dekomposisi tidak sempurna dalam jangka waktu yang lama, sehingga memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Jenis tanahnya tergolong organosol, podsol, maupun glei humus. Proses dekomposisi yang tidak sempurna ini terjadi karena berlangsung dalam kondisi oksigen yang sangat terbatas atau anaerob. Pemerintah Indonesia melalui PP No. 57/2016 mendefinisikan gambut sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Gambut dapat memiliki ketebalan hingga lebih dari 20 m<sup>31</sup>.

Dijelaskan juga oleh Sahardjo<sup>32</sup> bahwa tanah gambut dapat menyimpan air 13–15 kali lipat dibandingkan berat gambut itu sendiri. Gambut bersifat seperti spons. Gambut akan menyerap dan menyimpan air pada musim hujan dan akan mengeluarkannya secara perlahan ke daerah sekitarnya pada saat musim kemarau. Hal inilah yang menyebabkan pada kondisi alaminya, lahan gambut selalu basah dan tergenang air sepanjang tahun. Gambut yang masih normal sangat efektif sebagai pencegah bencana banjir karena kemampuannya menyimpan air yang sangat banyak tersebut, namun penelitian kami pada lahan gambut yang telah terdegradasi di wilayah eks-Lahan Gambut Sejuta Hektare (PLG), Kalimantan Tengah menunjukkan gambut yang terdegradasi telah kehilangan kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan air. Selain fungsinya sebagai pengatur hidrologi, kemampuan lahan gambut dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan gambut juga berperan sebagai pengendali iklim global. Sekitar 46 Gt karbon atau 8–14 % dari karbon pada gambut di seluruh dunia tersimpan di lahan gambut Indonesia (Maltby dan Immirizi 1993). Oleh karena itu, setiap kerusakan yang terjadi di lahan gambut akan menyebabkan hilangnya karbon ke udara dan menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global. Tingginya tingkat kehilangan CO<sub>2</sub> ke udara jika terjadi kerusakan pada gambut, baik melalui penebangan liar, konversi lahan gambut, ataupun kebakaran lahan diakibatkan komposisi bahan pembentuk gambut yang terdiri

---

<sup>31</sup> Bambang Hero Saharjo, Lailan Syaufina, Ati Dwi Nurhayati Erianto Indra Putra, Robi Deslia WalDI Wardana, *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*, Penerbit IPB Press, Bogor.

<sup>32</sup> Ibid.

dari bahan organik yang mengandung lebih dari 50% karbon sebagai unsur pembentuknya.

Kebakaran lahan gambut dapat terjadi dengan mudah ketika lahan gambut berada dalam kondisi kering. Lahan gambut dapat kering secara alami ataupun karena dikeringkan dengan cara pembuatan kanal-kanal yang mengalirkan air dari rawa gambut ke sungai. Kebakaran lahan gambut yang terjadi secara alami tidak berbahaya dan terjadi pada musim kemarau dengan dampak kebakaran yang sangat kecil. Kebakaran hutan yang terjadi secara alami bahkan dapat memberikan dampak yang positif karena dapat mengurangi spesies keanekaragaman hayati yang terlalu dominan sehingga terjadi keseimbangan ekosistem di hutan atau lahan gambut<sup>33</sup>.

Berdasarkan tipe, kebakaran hutan dan lahan dikelompokkan menjadi 3 tipe yaitu kebakaran bawah (*ground fire*) adalah kebakaran pada bagian bawah permukaan tepatnya pada lapisan organik. Kebakaran permukaan (*surface fire*) yaitu kebakaran yang terjadi di permukaan yang membakar seresah, semak belukar, pancang, dan limbah pembalakan. Kebakaran tajuk (*crown fire*) adalah kebakaran yang terjadi pada pucuk-pucuk pohon.

Proses kebakaran lahan gambut diawali adanya penyulutan api yang menyebabkan api bergerak ke segala arah. Kebakaran yang terjadi di bagian permukaan sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin. Jika kecepatan angin tinggi maka kebakaran yang terjadi juga akan semakin besar dan dapat memicu kebakaran tajuk. Bagian dari pohon yang terbakar dapat diterbangkan angin dan jatuh ke tempat baru sehingga memicu kebakaran di lokasi lain. Semakin rendah kadar air pada gambut maka akan semakin cepat laju pembakarannya. Kebakaran gambut masih bisa terjadi pada kadar air 119% yang merupakan kadar air kritis kebakaran gambut. Tingkat dekomposisi gambut juga mempengaruhi keterbakaran gambut, semakin matang gambut (jenis saprik) semakin sulit terbakar dibandingkan dengan jenis gambut yang belum matang (jenis fibrik dan hemik). Tinggi muka air akan mempengaruhi kadar air gambut, sementara curah hujan mempengaruhi tinggi muka air lahan gambut (Saharjo dan Syaufina, 2004).

---

<sup>33</sup> Afid Nurkholis, Amalya Suci W, Ardian Abdillah, Arum Sari Widiastuti, Ayu Dyah Rahma, Deka Ayu Maretya, Gina Aprila Wangge, Yuli Widyaningsih, *Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (Studi Kasus Provinsi Riau)*, <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/CMZUF>.

Sementara itu, kajian tentang karhutla yang bersifat riset akademis, memiliki beragam sudut pandang yang bisa dijelaskan dalam beberapa kajian dan pendapat. Beberapa kajian menunjukkan mengenai faktor pendukung terjadinya karhutla.<sup>34</sup> Kondisi pertama adalah kondisi iklim. Kondisi iklim terutama pada periode dimana curah hujannya rendah merupakan salah satu pendorong terjadinya kebakaran. Kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi akan terjadi jika ditemukan adanya gejala El Nino. Gejala fenomena ini merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kebakaran hebat di tahun 1997/1998, dimana pada saat itu Australia dan Afrika bagian selatan mengalami kekeringan dan menyebabkan meningkatnya suhu di Asia. El Nino adalah fenomena alam yang dicirikan dengan memanasnya temperatur laut secara tidak wajar di daerah Pasifik katulistiwa. El Nino terjadi dalam interval waktu 4 atau 5 tahun sekali. Kerawanan terjadinya kebakaran akan mulai berkurang pada kondisi dimana mulai turun hujan, yaitu pada bulan-bulan tertentu dimana tergolong musim hujan tapi kadang-kadang terdapat beberapa hari tidak turun hujan. Pada kondisi seperti ini masih memungkinkan terjadinya pengeringan bahan bakar sehingga dapat saja terjadi kebakaran. Peristiwa kebakaran akan sangat rendah apabila musim hujan telah stabil, dimana hampir setiap hari turun hujan. Pada kondisi ini hutan dan lahan gambut akan tergenang oleh air sehingga bahan bakar mempunyai kadar air tinggi dan sulit terbakar.

Kondisi kedua adalah kondisi fisik. Kondisi fisik lahan dan hutan yang telah terdegradasi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kebakaran. Terdegradasinya hutan dan lahan gambut dapat disebabkan oleh aktivitas illegal logging, konversi lahan dan hutan gambut untuk pemukiman, persawahan, perkebunan dan pertambangan. Selain itu, keberadaan parit/saluran yang dibuat oleh masyarakat untuk mengeluarkan kayu dari hutan juga memperparah tingkat kerusakan lahan gambut. Illegal logging telah menyebabkan hutan terbuka dan terakumulasinya limbah hasil logging yang menjadi sumber bahan bakar. Konversi lahan dan hutan gambut menjadi pemukiman, persawahan dan perkebunan mendorong dilakukannya *land clearing* menggunakan api. Pembuatan

---

<sup>34</sup> Wahyu Catur Adinugroho I N. N. Suryadiputra Bambang Hero Saharjo Labueni Siboro, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetland Internasional Indonesia, 2004.

kanal-kanal dan parit telah menyebabkan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau, sehingga gambut menjadi rusak. Terjadi gejala kering tak balik (irreversible drying) dan gambut berubah sifat seperti arang sehingga tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air<sup>35</sup>.

Kondisi berikutnya adalah kondisi sosial, budaya dan ekonomi, dimana areal gambut umumnya merupakan lahan rawa yang miskin hara dan tergenang air setiap tahunnya sehingga kurang cocok bagi pertanian. Oleh karena itu, kondisi demikian memaksa masyarakat untuk mempertahankan hidupnya hanya dengan berburu satwa liar, menangkap ikan dan menebang kayu secara ilegal (illegal logging). Kegiatan illegal logging belakangan ini telah agak berkurang, diantaranya disebabkan oleh telah habisnya pohon-pohon komersial di dalam lokasi hutan sehingga untuk mendapatkan pohon komersial mereka harus masuk sangat jauh ke dalam hutan dan dengan akses yang lebih sulit, selain itu diduga telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak illegal logging sebagai hasil dari kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukan baik oleh beberapa LSM maupun pemerintah serta meningkatnya kesadaran mereka akan dampak negatif akibat penebangan yang mereka rasakan secara langsung. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Wetlands International – Indonesia Programme di Bagian Hutan Perian PT. ITCI, Kalimantan Timur pada tahun 2000 dilaporkan bahwa hutan rawa gambut memiliki manfaat ekonomi secara langsung yang cukup besar, yakni Rp 8.128.141.017 per tahun (Tabel 4). Nilai produksi terbesar berasal dari hasil perikanan (70,2%) yang digunakan untuk kepentingan komersial dan pemenuhan kebutuhan subsisten. Nilai produksi lainnya berupa kayu sebesar 27,707%.

Berdasarkan informasi penduduk setempat, terdapat indikasi penurunan manfaat ekonomi dari hutan tersebut, baik produksi perikanan, kayu ataupun hasil hutan lainnya. Kejadian kebakaran dan kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumberdaya hutan telah mengakibatkan rusaknya habitat dan matinya beberapa jenis satwa dan tumbuhan. Hal ini berdampak pada terjadinya penurunan nilai produksi sumberdaya hutan yang akhirnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi

---

<sup>35</sup> Ibid.



masyarakat mengingat sumberdaya hutan merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk setempat.

Budaya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam telah mendorong terjadinya eksploitasi yang tidak terkendali dan kurang bertanggung jawab. Masyarakat setempat kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi buta (illegal logging, perdagangan satwa yang dilindungi, penangkapan ikan dengan setrum ataupun racun, dan lain-lain). Hal inilah yang menjadi potensi ancaman rusaknya kelestarian hutan. Masih lemahnya kesadaran para pengusaha kehutanan/perkebunan dalam mengalokasikan anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan terlihat dalam pelaksanaan penyiapan lahan. Meskipun pemimpin perusahaan menganjurkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan tanpa bakar, tapi karena minimnya anggaran dan kurangnya kontrol menyebabkan para kontraktor pelaksana pembuka lahan melakukannya dengan pembakaran karena biayanya lebih murah, yang akhirnya pembakaran tidak dapat dikendalikan dan terjadilah kebakaran<sup>36</sup>.

Untuk karhutla tahun ini, sampai awal Oktober, KLHK sudah menyetel 64 perusahaan, sektor kehutanan, maupun perkebunan sawit. “Ada 20 perusahaan asing, Malaysia, Singapura dan Hong Kong,” katanya.

Perusahaan-perusahaan ini ada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. KLHK, kata Roy, punya data perusahaan bersumber dari berbagai instansi.

Sampai awal Oktober, KLHK sudah menetapkan sembilan tersangka, delapan perusahaan dan satu perorangan. Dia bilang, penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersegel itu jadi target Direktorat Penegakan Hukum, KLHK.

“Jumlah ini akan bertambah. Di Jambi, akan *nambah*, di Kalteng, di Sumsel, akan *nambah*. Walau api sudah padam, jejak arang, jejak digital masih ada. Kami akan lakukan. Nama-nama dan perusahaan, Indonesia dan luar,” kata Roy.

---

<sup>36</sup> Ibid.



### **BAB III**

## **DESA GELEBAK DALAM, DARI MASALAH MENUJU SEJAHTERA**

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan [Karhutla] setiap kali musim kemarau. Karhutla disertai bencana kabut asap di Sumatera Selatan mulai muncul tahun 1960-an.

Karhutla yang diikuti bencana kabut asap selama beberapa pekan di Sumatera Selatan tercatat tahun 1967. Karhutla disertai bencana kabut asap kembali tercatat pada 1997 dan 1998. Sejak saat itu peristiwa berulang, seperti tahun 2005, 2015 dan 2019 ini.

Bedanya jika kebakaran dan bencana kabut asap di tahun 1960-an karena kondisi ekonomi masyarakat sebagai dampak transisi politik dari Orde Lama ke Orde baru, sehingga banyak masyarakat perkotaan yang pulang ke dusun untuk membuka hutan untuk perkebunan dan pertanian, maka karhutla pada tahun 1990-an dan 2000-an ini dikarenakan berbagai sebab. Mulai dari illegal logging, perambahan lahan [yang diduga dilakukan pengusaha dan para pendatang dari luar Sumatera Selatan], konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat lokal, kemiskinan, termasuk minimnya pengetahuan dan teknologi masyarakat desa atau dusun dalam mengelola lahan tanpa membakar.

Bila tahun 1960-an yang terbakar umumnya lahan mineral, maka tahun 1990-an dan 2000-an, sebagian besar rawa gambut yang mulai terbuka akibat aktifitas perusahaan HPH, dan mulai mengering atau kehilangan daya resap airnya setelah dijadikan perkebunan dan pertanian.

Yang jelas dampak karhutla berupa kabut asap sudah berulang kali dirasakan masyarakat Sumatera Selatan. Selain mengganggu kesehatan, juga menyebabkan berbagai aktifitas manusia baik terkait pemerintahan, ekonomi, transportasi, hingga pendidikan, menjadi terganggu. Belum lagi dampak kebakaran yang menyebabkan habisnya hutan beserta isinya, serta habisnya tanaman pada ribuan hektare lahan pertanian dan perkebunan.

Pasca karhutla 2015 lalu, pemerintah Sumatera Selatan sangat serius ingin mengatasi atau mencegah karhutla terulang. Tekad ini sama seperti yang diinginkan pemerintah pusat. Pemerintah Sumatera Selatan kemudian berkoordinasi dan menggalang dukungan dari pemerintah pusat, TNI dan Polri, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan, perusahaan, serta dukungan dari pemerintah asing seperti Norwegia, Inggris, Jepang, Rusia dan Australia.

Pertarungan upaya tersebut pada 2018, saat Palembang menjadi salah satu kota penyelenggaraan Asian Games ke XVII. Tantangannya cukup berat sebab event olahraga negara-negara Asia tersebut digelar pada saat musim kemarau, dan musim kemarau pun dipengaruhi oleh El Nino yang mana suhu cukup tinggi yang disertai angin yang kencang.

Upaya tersebut cukup berhasil, tidak terjadi bencana kabut asap, meskipun tetap terjadi sejumlah titik api di Sumatera Selatan. Pemerintah pusat pun memberikan penghargaan terhadap pemerintah Sumatera Selatan, Dewan Sumatera Selatan, TNI dan kepolisian di Sumatera Selatan.

Kunci keberhasilan ini tentunya karena koordinasi antarlini, dan mulai memperhatikan upaya pencegahan dibandingkan pemadaman api atau kebakaran, termasuk pula melahirkan sejumlah kebijakan atau peraturan terkait pencegahan karhutla. Upaya pencegahan tersebut adalah pembinaan, penyadaran dan penguatan ekonomi di tingkat tapak atau masyarakat desa yang wilayahnya selama ini mengalami karhutla.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pemerintah Sumatera Selatan terdapat 174 desa di Sumatera Selatan yang pada 2015 mengalami karhutla, termasuk di tahun-tahun sebelumnya. Ke-174 desa tersebut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Banyuasin, Ogan Ilir [OI], Musi Banyuasin [Muba], Muaraenim, Musirawas, dan lainnya.

Ke-174 desa tersebut didampingi berbagai pihak. Mulai dari organisasi nonpemerintah, Badan Restorasi Gambut [BRG], perusahaan, KLHK, hingga TNI. Pendampingan yang dilakukan sesuai bidang tugas masing-masing instansi, dimana BRG fokus pada pelestarian kawasan gambut, perusahaan pada upaya pemanfaatan lahan untuk kepentingan industri namun tidak boleh melakukan pembakaran lahan. KLHK berfungsi sebagai pengawal dan pengawas kebijakan yang dibuat agar bisa berjalan dengan baik.

Sementara kepolisian dan TNI fokus pada penegakan hukum dan pelibatan partisipasi masyarakat.

Ternyata, pada 2019 ini karhutla kembali terjadi dan menyebabkan bencana kabut asap. Pertanyaannya, apakah karhutla 2019 kembali terjadi di wilayah 174 desa tersebut?

Tidak semuanya. Ada beberapa wilayah [lahan pertanian, perkebunan dan hutan] desa yang tidak mengalami karhutla pada 2019 ini. Salah satunya Desa Gelebak Dalam di Kabupaten Banyuasin. Keberadaan Gelebak Dalam sudah disinggung di BAB I laporan penelitian ini, yaitu desa yang kemudian dianggap dan memang terbukti mampu mencegah karhutla, walaupun potensi kebakaran itu sangat besar. Desa ini juga mampu menunjukkan bahwa dengan pola dan tata cara yang dilakukannya, ternyata bisa menciptakan sinergi antara warga dengan lingkungan setempat.

### **Sejarah dan Budaya Desa Gelebak Dalam**

Desa Gelebak Dalam berada di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Desa ini letaknya lebih dekat dengan kota Palembang [24 kilometer], ibukota Sumatera Selatan, dibandingkan Pangkalan Balai, ibukota Kabupaten Banyuasin, yang jaraknya sekitar 74 kilometer dari Gelebak Dalam.

Desa ini berada sekitar 29 meter dari permukaan laut [DPL] dan suhu rata-rata selama setahun yakni 37 derajat celcius. Sebelah utara Desa Gelebak Dalam berbatasan dengan Desa Tanjung Merbu, sebelah timur dengan Desa Sako. Dua desa ini juga berada di Kecamatan Rambutan. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Komering yang masuk Kabupaten [Ogan Komering Ilir].

Desa Gelebak Dalam merupakan satu-satunya pemukiman kaum ningrat Kesultanan Palembang yang berada di luar kota Palembang. Pembentukan pemukiman awalnya disebut Sri Kuto Parung Priyayi pada 1795 yang dipimpin Depati Mamat.



Gambar 2. Kondisi Persawahan di Desa Gelebek Dalam  
Sumber : Dokumentasi penelitian

Tahun 1907, ketika pemerintah Belanda membentuk pemerintahan marga, permukiman Sri Kuto Parung Priyayi digabungkan dengan sejumlah dusun sekitarnya, yang kemudian berubah nama Marga Parung Priyayi yang dipimpin seorang pesirah.

Selanjutnya ketika Indonesia membentuk pemerintahan desa, pertengahan tahun 1970-an, Marga Parung Priyayi menjadi Desa Gelebek Dalam. Nama ini diambil dari nama potongan kayu dari pohon Gelebak yang terendam dalam sebuah rawa, sebagai lokasi pemukiman baru masyarakat. Pemimpin masyarakat bukan lagi pesirah, tapi kepala desa yang dipilih melalui musyawarah atau pemilihan langsung.

Saat ini desa yang luasnya 1.773 hektare berpenduduk sekitar 2.000 jiwa dari 552 kepala keluarga. Seperti di masa lalu, umumnya warga desa masih berkebun karet dan bersawah. Hanya Sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, dan lainnya.

Sebagai keturunan ningrat, sejumlah adat dan tradisi peninggalan Kesultanan Palembang [berazaskan ajaran Islam] masih dipertahankan warga desa ini, seperti adat kelahiran, adat berkebun dan memelihara hewan berkaki empat, adat pernikahan, serta adat sopan santun itu terkait tata susila atau etika, seperti dilarang seorang lelaki menyentuh atau memeluk gadis, istri orang atau janda yang bukan istrinya. Jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi adat.

Sanksi adat mulai dari timbang bangun, basuh dusun, denda, ganti rugi, mengembalikan semua biaya, penyingsingan, setengah bangun, tekap malu, tepung tawar, wajib dikawinkan. Sanksi-sanksi itu diberikan berdasarkan pelanggaran dari sejumlah adat, yang bertujuan untuk memelihara tata tertib dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Sementara tradisi misalnya upacara kematian berupa takziah selama tujuh hari, makan bersama yang disebut *sedulang setudung* yang dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi dan hari-hari besar Islam, adat sopan santun, dan lainnya. Tradisi keagamaan seperti ini masih rutin dilakukan karena memang semua penduduk beragama Islam. Semangat keagamaan cukup kental di desa ini dan itu selalu menjadi ciri khas bagi masyarakat.

Tradisi kesenian yang masih dipertahankan antara lain tari dana, tari tumbak lado, music tanjidor, rebana, seni suara, syarofal anam, bangsawan, drama pencak silat, serta ningkuan.

Kuliner peninggalan masa Kesultanan Palembang yang bertahan di Desa Gelebak Dalam, seperti ketupat mimpi, bubur merah putih, bubur kuduk, burgo, lakso, rangin, sagon, kue satu, enggak ketan, kue lapan jam, bolu selai, matsuba, bolu lapis, dan lainnya.

Semua aturan adat dan tradisi tersebut dijaga pemerintahan Desa Gelebak Dalam melalui Peraturan Desa [Perdes] No.5 Tahun 2018 tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Komplilasi Adat Istiadat Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebak Dalam.

### **Tradisi membakar lahan**

Sama seperti masyarakat desa lainnya di Sumatera Selatan atau Indonesia, selama ratusan tahun masyarakat memiliki tradisi membuka lahan untuk bertani, bersawah dan berkebun, dengan cara membakar. Tapi metode ini memiliki aturannya. Misalnya diberi batas api atau pembakaran dan dijaga. Cara membakar ini disebut kekas.



### Gambar 3. Peristiwa Karhutla yang terjadi di 2015

Di masa lalu, tradisi ini diatur Kesultanan Palembang melalui kitab Oendang-oendang Simboer Tjahaja yang ditetapkan pada abad ke-17. Kitab Simboer Tjahaja merupakan hukum adat tertulis di Kesultanan Palembang yang diberlakukan hingga awal kemerdekaan.

Pasal 53 pada Kitab Simboer Tjahaja pasal 53 disebutkan, “Jika orang membuka ladang atau kebun hendaklah sekurang-kurangnya 7 depa dari jalan besar, siapa saja melanggar dihukum dengan denda sampai 6 ringgit secara bagian dari ladang atau kebunnya yang sudah masuk ukuran depa tidak boleh 2 jukan”.

Pasal 54 menyebutkan, “Barang siapa akan membakar ladang hendaklah waktunya ia beritahu lebih dahulu pada proatingnya serta pukul canang sekaligus dusun, maka siapa melanggar dihukum denda sampai 12 ringgit serta harus mengganti harga tanduran yang mutung. Jika kekasnya sudah dibuat lebar 7 depa dan telah diterima orang yang punya kebun, maka itu kebun angus juga tidak lagi ia kena akan denda ganti kerugian”.



Pengaturan sanksi tertera pada pasal 55: “Jika membakar ladang lantas api melompat ke hutan lantaran kurang jaga, maka yang salah di denda sampai 12 ringgit”.

Namun tradisi ini tampaknya tidak cocok dilakukan di rawa gambut. Sebab saat ini rawa gambut tidak seperti di masa lalu yang masih basah pada saat musim kemarau. Jika satu kawasan rawa gambut terbakar, maka baranya pun sulit dipadamkan dan cepat meluas ke kawasan rawa gambut lainnya. Ini yang menjadi penyulut karhutla tahun 1990-an dan 2000-an.

Pemerintah pun mengeluarkan aturan yang melarang pembakaran lahan. Jika dilanggar akan ditangkap dan dihukum. Ternyata aturan ini tidak memberikan dampak negative, sebab masyarakat yang masih melakukan pembakaran lahan justru menjadi “takut” sehingga mereka tidak lagi menjaga lahan yang dibakarnya seperti dalam aturan adat. Akibatnya kebakaran menjadi meluas, apalagi berada di rawa gambut.

Tradisi ini pula yang dipertahankan masyarakat Desa Gelebak Dalam di bawah tahun 2015, yang sebagian kecil lahannya berupa rawa gambut.

“Tapi setelah peristiwa karhutla tahun 2015 lalu, kami berusaha tidak lagi melakukan pembakaran. Kalaupun dibakar, dilakukan secara sedikit demi sedikit dan dijaga. Alhamdulillah tahun 2019 ini tidak ada titik api di desa kami,” kata Hendri Sani, kepala Desa Gelebak Dalam.

Dijelaskan Hendri Sani dalam membangun kesadaran pada masyarakatnya untuk tidak lagi membakar lahan berkat binaan dan pendampingan dari Korem 044 Garuda Dempo saat dipimpin Brigjen Kunto Arief Wibowo. Keberadaan tentara dalam proses pembinaan Desa Gelebak Dalam memang terlihat jelas, bahkan di desa ini terdapat pula lapangan tembak tentara yang memang diperuntukkan oleh desa. Melalui kepala desa, tentara diberikan wilayah khusus untuk mengadakan praktek latihan menembak.

### **Teknologi Bios 044 dan Pencegahan Karhutla**

Berdasarkan pengetahuan masyarakat [petani], pembakaran lahan yang mereka lakukan selama ini bertujuan selain membersihkan lahan juga mengurangi kadar asam, dan menghasilkan hara untuk kesuburan tanah. Artinya jika tidak dilakukan pembakaran lahannya membutuhkan pupuk, baik alami maupun kimia. Disinilah sebetulnya perlu

intervensi dari pihak luar sehingga bisa memberikan metode penyuburan tanah tanpa harus membakar.

Konsekwensi melarang petani membakar lahan tentunya ada solusi yang harus diberikan. Korem 044 Garuda Dempo yang mendidik masyarakat Desa Gelebak Dalam agar tidak membakar lahan, memberikan solusi berupa pemberian Bios 044 di lahan persawahan, pertanian dan perkebunan.

Apa itu Bios 044? Bios 44 merupakan paduan beberapa mikroorganisme. Bios 44 jika disiramkan ke lahan rawa gambut mampu memperkecil hingga menutupi rongga-rongga lahan, serta menyuburkan. Cairan Bios 044 tidak berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan, menjadi sumber makanan bagi ikan.

“Dari uji coba kita terhadap satu hektare sawah, ternyata rata-rata hasil gabah setiap kali panen mengalami peningkatan sekitar 0,5 ton gabah padi,” kata Handri. Jika menggunakan pupuk kimia gabah padi yang dihasilkan sekitar 7 ton per hektare, sementara menggunakan Bios 044 menjadi 7,5 ton. Selain itu padi yang dihasilkan lebih organik dan kesuburan lahan bertambah bukan berkurang.



### Gambar 3. Lahan sawah yang sudah ditaburi BIOS 44

“Tahun 2019 ini kita berencana meningkatkan luasan sawah yang ditebarkan Bios 044 yang dibantu dari Korem 044 Garuda Dempo,” kata Hendri. Luasan sawah di Desa Gelebak Dalam sekitar 800 hektare. Pendapatan yang dihasilkan desa ini dari padi selama setahun dengan dua kali masa tanam berkisar 6.720 ton beras atau sekitar Rp55 miliar pada saat ini.

Apa yang keuntungan dari menggunakan Bios 044? “Yang pertama hemat biaya pupuk. Jika selama ini kami mengeluarkan biaya sekitar satu juta rupiah per hektare setiap kali masa tanam, maka biaya itu berkurang sekitar 50 persennya. Lalu peningkatan produksi padi dari sawah kami. Juga kami dikasih tahu jika kualitas sawah kami jauh lebih terjamin kondisinya karena tidak tergantung dengan pupuk kimia.

### **Kemandirian air bersih**

Perubahan bentang alam, seperti berkurangnya hutan, rusaknya sungai dan hilangnya kawasan rawa gambut, baik di Desa Gelebak Dalam maupun sekitarnya, menyebabkan desa ini mengalami krisis air. Khususnya air yang dikonsumsi. Kondisi kian parah jika di musim kemarau. Kondisi ini berlangsung sejak 11 tahun terakhir.

“Dari hitung kami, setiap bulan sedikitnya Rp42 juta uang dari warga di desa ini yang dibelanjakan untuk air mineral yang didatangkan dari Palembang. Ini ironi dan sangat tidak terbayangkan para tetua di desa puluhan tahun lalu, yang saat air sungai

masih jernih dan melimpah,” jelas kata Hendri. “Warga terpaksa membeli air mineral sebab air Sungai Tilan dan Sungai Tengkabu, serta sumur tanah tidak layak dikonsumsi. Hanya bisa digunakan untuk mandi dan mencuci,” lanjutnya.

Kondisi seperti ini tentu memerlukan solusi sendiri. Tak bisa melalui satu departemen saja, tapi harus beramai-ramai. Semua unsur harus dilibatkan karena disinilah awal mulainya sudut pandang dalam pencegahan karhutla. Keterlibatan semua pihak menjadi penting, yang disebut dengan koordinasi antar organisasi. Inilah yang disebut dengan manajemen pengelolaan dalam kasus karhutla. Semuanya kemudian harus diawali dengan pemahaman tentang karhutla itu sendiri. Sementara desa Gelebek Dalam sendiri sudah memiliki mekanisme sendiri dalam memaknai hal ini. Pemahaman ini tidak hanya datang belakangan, namun dari berinteraksi dengan kondisi lingkungan sekitar, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kebiasaan untuk selalu berada dengan alam dan kemudian memaknai kondisi yang ada menjadi nilai tambah tersendiri bagi warga Desa Gelebek Dalam.

Oleh karena itu, usaha dalam memahami dan memaknai lingkungan menjadi wajib dan harus dilakukan, karena terkait dengan kemampuan dalam mencari dan mendapatkan sumber air bersih. Karhutla berpotensi mengeringkan sumber air, sementara ini kebutuhan pokok yang harus didapatkan.



**Gambar 4. Anak-anak di Desa Gelebak Dalam yang setiap hari bermain tak jauh dari air. Foto Nopri Ismi/Mongabay Indonesia**

Berbagai upaya dilakukan Hendri Sani yang baru empat tahun menjadi kepala desa untuk mendapatkan sumber air bersih tersebut. Dirinya pernah berencana menggunakan anggaran dana desa untuk membeli mesin pengelolaan air mineral. Tapi tidak mendapatkan dukungan dari perangkat desa sebab dinilai resikonya terlalu tinggi karena biayanya tinggi.

“Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Korem 044 Garuda Dempo. Kita pun mendapatkan teknologi pengelolaan air bersih yang bernama Filter Air Nusantara,” kata Hendri. Mendapatkan air bersih dengan menggunakan teknologi ini menjadi solusi penting karena keterbatasan lokasi dan kondisi yang ada.



**Gambar 5. Hendri Sani, kepala Desa Gelebak Dalam, di depan teknologi Filter Air Nusantara. Dia bercerita mewujudkan desanya menjadi desa mandiri. Misalnya di masa mendatang tidak lagi tergantung dana desa. Foto Nopri Ismi/Mongabay Indonesia.**

Air mineral yang dihasilkan dari teknologi ini memang tidak dibagikan secara gratis, tetap dijual kepada warga di Desa Gelebak Dalam. Tapi harganya jauh lebih murah dari air mineral yang didatangkan dari luar. Selain itu hasil tes kualitasnya juga lebih baik dari air mineral yang beredar di pasaran. Terutama kandungan logamnya.

PH dan kandungan logam air mineral produksi desanya dengan air mineral yang dijual umum, menunjukkan PH air mineral hasil teknologi Filter Air Nusantara kisaran 7-8, sementara air mineral kisaran 6-7,5. Tetapi kandungan logamnya cukup baik, jika air mineral pasaran ppm-nya berkisar 40-an, sementara air mineral produksi desanya kisaran 3-4.



**Gambar 6. Perbandingan kandungan logam air mineral yang dijual umum dan air mineral yang dihasilkan Bumdes Maju Bersama 044 di Desa Gelebak Dalam. Foto Nopri Ismi/Mongabay Indonesia**

Air mineral yang diproduksi Desa Gelebak Dalam ini dijual ke warga sebesar Rp4.000 per galon. Sementara air mineral yang didatangkan dari Palembang harganya Rp5.000 per galon. Pelanggannya kini bukan hanya warga Desa Gelebak Dalam, juga warga desa di sekitarnya. “Tapi kita lebih mendahulukan warga desa, sebab produksi tergantung dari stok air di desa yang diambil dari sebuah kolam tanah buatan,” katanya.

Pendapatan atau pemasukan dari bisnis air mineral yang dikelola Bumdes [Badan Usaha Desa] selain digunakan buat biaya operasional, juga untuk kas pembangunan desa. “Kami ini bercita ingin membangun desa tanpa dana desa ke depannya. Selain itu dana desa juga sewaktu-waktu dapat dihentikan pemerintah.”

### **Teknologi pertanian**

Upaya mencegah karhutla, selain memberikan Bios 044, pemerintah Desa Gelebak Dalam juga memberikan bantuan pembersihan dan penataan lahan menggunakan ekskavator. Misalnya menggali lubang di persawahan atau kebun untuk meletakkan rerumputan atau potongan kayu yang habis dibersihkan dan ditebang kemudian ditutupi tanah. Selain berfungsi untuk menata persawahan dan kebun, termasuk menata irigasinya.

Ekskavator ini sendiri bukanlah penyewaan kepada pihak lain, tetapi sengaja dibeli Kepala Desa dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank. Cukup berani langkah yang dilakukan Kepala Desa, tetapi ia mengaku itulah salah satu cara terampuh dalam mendorong perekonomian warga. Pemakaian ekskavator kemudian disewakan ke warga dengan harga yang lebih murah. Setiap bulannya Kepala Desa membayar angsuran ke bank untuk menyicil pembelian. Sampai saat ini masih berjalan baik dan hasilnya pun diraskan sudah memadai.

“Mesin ini kami kredit dengan bantuan sebuah bank. Pembayarannya hasil dari Bumdes dan sumbangan dari warga yang menggunakan mesin tersebut,” katanya. Cara yang dilakukan Kepala Desa ini memang kemudian terbukti ampuh untuk menggalang partisipasi dan kebersamaan warga dalam menggerakkan pembangunan didesanya. Walaupun ini kemudian tergolong berani dan sangat beresiko, tetapi Kepala Desa yakin dengan cara yang dilakukannya ini.





Gambar 7. Ekskavator milik Desa Gelebak Dalam, sarana membangun desa yang mandiri

Kepala Desa sendiri malah berencana akan menambah satu buah lagi ekskavator yang nantinya bisa disewakan ke warga lain dan menjadi badan usaha milik desa. Segala hasil yang didapat akan menjadi kas desa dan dibagi dengan pengelola. Ini sengaja dilakukan Kepala Desa karena memang capaiannya ke arah itu.

Selain itu, agar biaya pengeluaran masyarakat berkurang Korem 044 Garuda Dempo meminjamkan mesin pemotong padi. Masyarakat tidak perlu lagi menyewa alat pemotong padi atau mengupah orang untuk memanen sawahnya. Selain minim biaya, menggunakan mesin ini juga menghemat waktu, sehingga padi dihasilkan lebih optimal atau jauh dari serangan burung dan tikus.

“Ke depan kita akan mengusahakan adanya mesin pemotong padi milik desa. Setiap petani yang memanen cukup membeli BBM dan membayar operatornya, bukan menyewa mesinnya.”

“Bagi saya, seperti pengarahan dari kawan-kawan dari Korem 044 Garuda Dempo, kesejahteraan petani akan meningkat dan karhutla dapat dihilangkan jika adanya dukungan teknologi pertanian,” ujarnya.

### **Ekowisata**

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Gelebak Dalam, desa tersebut juga akan mengembangkan ekowisata. Desa ini memiliki keindahan jika ratusan hektare sawahnya menghijau dan menguning. Potensi ini selama ini belum terolah dengan baik, hanya dipergunakan sebagaimana keperluan sehari-hari. Bagi warga Desa Gelebak

Dalam, ini adalah potensi yang kemudian bisa dikembangkan. Pengembangan sawah dan pencetakan lahan-lahan berikutnya akan selalu dilakukan, tentunya dengan konsep pengembangan areal yang kemudian bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Setelah panen padi, desa ini pun melimpah dengan hasil ikan sungainya. “Selama ini banyak pemancing dari Palembang yang berkunjung. Mereka gratis. Nah ke depan mereka akan membayar, yang mana bayaran itu menjadi pendapatan desa.”

Mengenai potensi ikan ini memang menjadi perhatian tersendiri. Setidaknya ada jenis ikan yang lazim dikenal yaitu Gabus, Sepat, Lele, dan Nila. Ini adalah jenis ikan yang umum dikenal dimasyarakat, oleh karena itu potensinya menjadi begitu besar. Jika ini dimaksimalkan, tidak hanya pengolahan hasil ikan tangkap, tetapi juga pengolahan dalam bentuk kemasan lain, diyakini akan menjadi sumber pendapatan baru yang sangat potensial. Potensi dalam bentuk ikan asin, ikan sale, bisa dijadikan alternatif untuk memajukan pendapatan masyarakat.

Selama ini perikanan masih dikelola secara tradisional, yaitu ikan basah yang dijual sebagaimana adanya. Pengelolaan ikan asin hanya dilakukan secara tradisional dan tidak untuk dijual. Ini sebetulnya potensi yang besar, apalagi jika dikreasikan dalam berbagai bentuk.



Gambar 8. Lahan pertanian dan potensi ikan di perairan rawa, aset ekowisata yang potensial untuk dikembangkan

Selain daya tarik alam itu, mereka juga akan menggelar tradisi peninggalan budaya Kesultanan Palembang yang saat ini mulai terkikis atau hilang, termasuk di Palembang. “Jika banyak turis ke desa ini, saya percaya warga desa akan lebih menata kebun dan sawahnya, termasuk lingkungan rumah agar kelihatan bersih. Mereka kan malu jika dilihat orang luar kondisinya jorok atau tidak indah.”

Ekowisata memang menjadi alternatif lain dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sektor ini bisa muncul asalkan ada pengelolaan dan metode *branding* yang baik dan efektif. Proses *branding* membutuhkan waktu dan metode tersendiri, yang diyakini Kepala Desa bisa dilakukan asalkan mereka serius. Keseriusan inilah yang sekarang sedang digalang dan diusahakan oleh pemerintah desa Gelebak Dalam. Dimulai dari karhutla, harapannya ini akan berdampak pada sisi dan sektor lainnya.

Potensi yang juga bisa dikembangkan adalah home industri dengan bahan baku utama adalah pisang. Ini tergantung pada kreatifitas dan waktu luang yang dimiliki saja. Pisang banyak tumbuh di pinggir-pinggir lahan warga dan bisa menjadi potensi tersendiri, asalkan ada metode pengolahan yang baik dan terarah. Selama ini potensi ini belum dikembangkan, Kepala Desa berencana akan membuat berbagai proyek dan mekanisme pariwisata lainnya yang lebih menjanjikan dan bisa menjual. Berbagai potensi desa akan dikembangkan lebih banyak lagi.

## BAB IV

### PETA JALAN (ROAD MAP) PENDAMPINGAN

Telah disebutkan di awal bahwa kebakaran hutan dan lahan yang luas dan tak terkendali terjadi hampir sepenuhnya akibat ulah manusia (anthropogenic) dengan kepentingan utama meliputi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pengembangan usaha perkebunan atau kehutanan bahkan ada yang terkait dengan menjadi sebuah upaya perlawanan atas konflik lahan. Kebakaran terjadi baik di kawasan hutan, perkebunan ataupun areal penggunaan lainnya. Kebakaran tersebut berdampak kerugian pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Berlatar penyebab kebakaran, dimana kebakaran terjadi dan dampak dari kebakaran tersebut, pemerintah menginstruksikan agar Karhutla ditangani banyak lembaga pemerintah terkait<sup>37</sup>.

Sesuai dengan metodologi yang digunakan dalam riset ini, tahapan riset ini yang kemudian menunjukkan peta jalan (*road map*) yang telah dilakukan terbagi atas beberapa langkah yaitu :

1. Pengenalan masalah dan pendalaman masalah  
Hal ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan survey awal untuk mengetahui dan menunjukkan adanya masalah. Peneliti akan mendalami masalah dan mengenali secara lebih spesifik profil masalah tersebut.
2. Peleburan dengan komunitas  
Tahapan ini adalah untuk membangun kebersamaan dan partisipasi dengan komunitas sehingga pola hubungan lebih akrab dan terpadu.
3. Menguraikan identifikasi masalah bersama komunitas  
Tahapan ini dilakukan bersama sama dengan komunitas untuk menguraikan dan mengidentifikasi masalah secara rinci dan detail
4. Menentukan alternatif solusi masalah

---

<sup>37</sup> Kushartati Budiningsih, *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No.2, November 2017 : 165-186

Tahapan ini adalah memilih dari sekian banyak solusi, alternatif apa yang diterapkan.

5. Menerapkan alternatif solusi masalah

Bagian Ini adalah praktek dari solusi yang sudah dipilih, dilaksanakan bersama komunitas

6. Evaluasi dan refleksi

Tahap akhir ini adalah melihat dan meninjau semua hal yang sudah dilakukan dan apa kelemahan yang dialami selama ini, sehingga bisa didapatkan solusi kedepannya.

Masing-masing unsur dalam peta jalan tersebut akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

#### **4.1. Pengenalan Masalah**

Penelitian aksi selalu ditekankan pada sisi kemampuan dalam melihat masalah. Ini adalah titik awal berpijak, sebelum pembahasan tentang tindakan dan metode yang dilakukan. Menurut Grundy dan Kemmis (1990:322), penelitian aksi memiliki dua tujuan pokok, yaitu :

1. Meningkatkan (improve). Penelitian tindakan bertujuan meningkatkan bidang praktik, meningkatkan pemahaman praktik yang dilakukan oleh praktisi, dan meningkatkan situasi tempat praktik dilaksanakan.
2. Melibatkan (involve). Penelitian tindakan juga berusaha melibatkan pihak-pihak yang terkait. jika penelitian tindakan dilaksanakan di sekolah, pihak yang terkait antara lain, kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, dan orang tua siswa.

Intinya adalah pelibatan partisipasi dari objek yang diteliti. Oleh karena itu, pengenalan masalah yang berorientasi objek sangat diperlukan, karena ini akan menjadi dasar dalam melakukan perubahan dan tindakan nyata.

Pada konteks wilayah penelitian ini yaitu di Desa Gelebak Dalam dengan fokus pada pencegahan karhutla, maka beberapa metode yang dipakai dalam pengenalan masalah yang dilakukan adalah :

1. Pengumpulan dokumen terkait dengan persoalan karhutla di Sumsel, dokumen dan literatur tentang pemberdayaan komunitas, serta dokumen tentang Desa Gelebak Dalam sendiri.

Pengumpulan dokumen ini dilansungkan dengan metode kepustakaan, *searching* di internet, maupun mengumpulkan langsung dokumen di Desa Gelebek Dalam sendiri. Proses ini dilakukan selama penelitian berlangsung, dari awal hingga proses penulisan laporan. Melalui proses dokumentasi ini, didapatkanlah berbagai informasi penting terkait objek yang diteliti. Dokumen yang berhasil dikumpulkan dan kemudian menjadi informasi penting dalam analisis masalah adalah :

- a. UU No 32 tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup
- b. PP No. 71 tahun 2014 tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan gambut
- c. PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- d. PP No. 24 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
- e. PP Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- f. Perda Gubernur Sumsel No 8 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- g. Perpres No. 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
- h. Monografi Desa Gelebak Dalam
- i. Sejarah dan Perkembangan Desa Gelebak Dalam

Selain dokumen berupa peraturan hukum, diperoleh juga berbagai hasil analisis dan kajian para pihak tentang pemberdayaan komunitas, serta tentang pencegahan dan pengendalian karhutla. Dokumen ini cukup banyak yang terdiri dari berbagai kajian baik dari akademisi, LSM, maupun pemerintah sendiri. Cakupannya tidak hanya pada Desa Gelebak Dalam tetapi juga dari pihak pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengenalan masalah ini, terutama dari kajian dokumen adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya karhutla bisa diidentifikasi setidaknya dari beberapa faktor berpengaruh yaitu : kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan dengan tradisi sonor (membuka lahan dengan membakar), aktifitas masyarakat yang banyak membiarkan lahannya terlantar tidak diolah sehingga begitu mudah terbakar di musim kemarau. Penyebab lainnya adalah tidak adanya aktifitas perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran lahan untuk membuka areal baru.
2. Persoalan karhuta terkait pula dengan aspek manajemen pengelolaan yang berawal dari program-program pencegahan serta koordinasi antar instansi. Dari berbagai literatur terlihat bahwa masalah penanganan karhutla ini, banyak pula disebabkan oleh ketidakjelasan manajemen penanganan yang kemudian tampak dari tidak adanya program khusus pencegahan dan penanganan yang baik.
3. Persoalan karhutla juga terkait dengan ketidakjelasan atau ketiadaan visi yang jelas tentang metode penanganan. Umumnya yang dilakukan adalah pada saat tanggap darurat, sehingga semuanya, termasuk aparat pemerintah desa hanya fokus pada bagaimana upaya memadamkan api.
4. Persoalan lain dari karhutla adalah sudut pandang yang minim kreatifitas. Hampir tidak ada kreatifitas yang bersifat inovatif dalam mencegah munculnya api. Padahal potensi karhutla bisa ditekan seminim mungkin asalkan ada inovasi-inovasi strategis yang diterapkan. Peran pemerintah dan unsur-unsur lainnya sangat diperlukan sehingga karhutla bisa dicegah. Inovasi ini bisa dengan memanfaatkan teknologi atau metode-metode lainnya.
5. Karhutla juga terkait dengan sudut pandang dalam melihat lahan dan api. Umumnya sudut pandang yang dipakai menempatkan api adalah sesuatu yang bisa saja dan lazim terjadi di musim kemarau. Faktor kemarau panjang dijadikan alasan mendasar kenapa karhutla selalu terjadi. Oleh karena itu orientasi berikutnya adalah bagaimana memadamkan api dan menunggu agar hujan segera turun.
6. Karhutla juga dianggap sebagai persoalan kebijakan, misalnya kebijakan dalam membuka lahan gambut, perluasan perkebunan kelapa sawit dan

HTI. Pada beberapa hal ini bisa diterima, tetapi kemudian ternyata ini tidak bisa menggeneralisir semuanya seperti itu. Kajian dari CIFOR mengatakan bahwa karhutka sebagai masalah kebijakan tunggal dan kemudian perlu rekomendasi umum menyelesaikannya adalah keliru. Bahwa kebijakan pertanian dan perkebunan dianggap sebagai sumber masalah karhutla, harus diakui memang seperti, tetapi bukan satu-satunya penyebab.

Pengenalan masalah tersebut menjadi penting karena kemudian bisa dikonfirmasi dengan masyarakat di Desa Gelebak Dalam terutama tentang sudut pandang dalam melihat karhutla. Masyarakat Desa Gelebak Dalam ternyata memiliki sudut pandang tersendiri dalam melihat karhutla ini, yang kemungkinan bisa saja berbeda dengan sudut pandang yang digunakan pihak lain. Hal penting, kesimpulan dalam memahami masalah tersebut bahwa karhutla adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

#### **4.2. Peleburan dengan Komunitas Gelebak Dalam**

Tahapan ini dilakukan setelah peneliti memiliki pemahaman awal tentang masalah yang terjadi, terutama konteks karhutla di Desa Gelebak Dalam. Peleburan dengan komunitas diperlukan karena disitulah peneliti berbaur dan kemudian dianggap sebagai bagian dari komunitas tersebut. Melakukan proses ini tentu saja tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan bahwa peleburan komunitas pada dasarnya adalah menyatunya peneliti dengan kelompok masyarakat, khususnya Gelebak Dalam.

Untuk bisa melakukan peleburan dengan komunitas maka pemahaman tentang aspek komunitas sangat diperlukan, terutama kapasitas komunitas tersebut. Chaskin<sup>38</sup>(2001) menyatakan bahwa kapasitas komunitas merupakan hasil interaksi dari modal manusia, sumber daya organisasi, dan modal sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas yang dapat berpengaruh terhadap pemecahan persoalan secara kolektif dan meningkatkan

---

<sup>38</sup> Chaskin, J. Robert. 2001. *Building Community Capacity*. New York: Walter De Gruyter, Inc



serta memelihara kesejahteraan dari suatu komunitas. Suatu komunitas juga bersifat dinamis, maka kapasitas dari suatu komunitas juga dapat berubah-ubah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas dari suatu komunitas, antara lain (Chaskin, 2001):

- a. Keberadaan sumber daya mulai dari keahlian dari setiap individu hingga kekuatan organisasi dalam mengakses sumber daya keuangan;
- b. Jaringan hubungan;
- c. Kepemimpinan;
- d. Dukungan untuk pergerakan dimana setiap anggota komunitas dapat berpartisipasi dalam tindakan kolektif dan penyelesaian persoalan.

Lebih jauh, Chaskin (2001) mengidentifikasi karakteristik kapasitas komunitas sebagai berikut:

- a. Rasa memiliki dalam komunitas, menunjukkan tingkat keterhubungan anggota komunitas dan pengakuan terhadap keadaan yang saling menguntungkan (McMillan dan Chavis, 1986 dalam Chaskin, 2001).
- b. Komitmen, menjelaskan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota komunitas dalam keikutsertaannya dalam komunitas tersebut.
- c. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah, yakni kemampuan mengubah komitmen menjadi tindakan penyelesaian masalah.
- d. Akses terhadap sumber daya, kemampuan anggota komunitas untuk membuat hubungan instrumental dalam konteks yang lebih luas dan mengakses berbagai sumber daya yang tersedia.

Pemahaman terhadap aspek komunitas tersebut juga dilakukan di Desa Gelebak Dalam. Pemahaman ini diperoleh melalui tindakan peleburan atau mengikuti aktifitas masyarakat Gelebak Dalam sehingga kemudian diperoleh pemahaman kuat tentang keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan karhutla yang terjadi. Siapa dan bagaimana persoalan yang ada di Gelebak Dalam kemudian bisa dipahami secara lebih menyeluruh dan utuh, syarat utama untuk masuk ke wilayah pendampingan komunitas. Aspek partisipasi menjadi terdepan yang kemudian akan ditonjolkan pada proses ini.



Gambar 9. Peleburan diri dengan komunitas, bagian dari upaya untuk memahami partisipasi warga.

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Metode yang dilakukan dalam peleburan diri peneliti ke Desa Gelebak Dalam adalah sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi awal dengan Kepala Desa

Secara formal ini harus dilakukan karena untuk wilayah desa, sosok Kepala Desa menjadi tokoh penting yang berpengaruh. Oleh karena itu, peneliti melakukan koordinasi awal dengan Kepala Desa, yaitu Hendri Sani (37 tahun). Pertemuan dengan Kepala Desa membuka jalan untuk kemudian masuk ke masalah dan bertemu dengan masyarakat.

Terhadap Kepala Desa sendiri, peneliti sudah memiliki pengalaman sebelumnya, sudah ada hubungan yang terjalin sehingga memudahkan untuk

berkoordinasi dan tidak diperlukan pengenalan awal lagi. Peneliti bisa mengkoordinasikan dengan kepala desa berbagai program yang akan dijalankan, berbagai ide baru juga bisa dikomunikasikan dengan kepala desa.

b. Tinggal dan menetap di Desa Gelebak Dalam dalam beberapa waktu

Menetap di desa dilakukan dalam beberapa kali, yaitu sebanyak tiga kali dengan kurun waktu tiga hari sampai empat hari. Peneliti berdiam di rumah Kepala Desa dan kemudian mengikuti aktifitas Kepala Desa dengan masyarakat. Dalam beberapa kali kesempatan, peneliti mengikuti kegiatan tahlilan warga dan juga kegiatan rapat desa, serta beberapa kali ikut dalam pesta pernikahan yang dilakukan oleh warga. Pada tahap awal, peneliti masih seperti orang asing yang belum bisa membaur. Seiring dengan perjalanan waktu, peneliti mulai membiasakan diri dan warga juga sudah menerima peneliti apa adanya. Peneliti kemudian bisa mengikuti aktifitas warga secara langsung tanpa harus melalui Kepala Desa.

c. Mengikuti aktifitas pertanian warga sehari-hari

Desa Gelebak Dalam, sebagaimana dijelaskan dari awal adalah desa dengan karakteristik sebagai petani padi. Sawah adalah aktifitas utama yang mereka lakukan. Dalam hal ini, setelah menetap beberapa waktu peneliti kemudian bisa ikut dengan aktifitas warga tanpa harus melalui koordinasi dengan Kepala Desa. Melalui metode ini juga peneliti kemudian bisa melihat dan merasakan langsung bagaimana aktifitas pertanian yang dilakukan, terutama di musim kemarau. Susah dan repotnya warga dalam mengolah lahan saat lahan begitu gersang sangat terasa dan kemudian menjadi pemahaman penting bagi peneliti.

Dalam hal ini, peneliti bisa mengalami dan melihat aspek partisipasi sebagaimana pernah dijelaskan oleh Sugiono<sup>39</sup> (2009) bahwa terdapat beberapa bentuk partisipasi yaitu :

- a) Partisipasi pasif (*passive participation*): *means the research is present at the scene of action but does not interact or participate*. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

---

<sup>39</sup> Sugiyono (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Penerbit Alfabeta Bandung

- b) Partisipasi moderat (moderate participation): *means hat the researcher maintains a balance between being insider and being outsider.* Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan , tetapi tidak semuanya,
- c) Partisipasi aktif (Active participation): *means that the resercher generally dose what others in he setting do.* Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap,
- d) Partisipasi lengkap (*complete participaion*): *means the researcher is a natural participant. This is the highes level of involvement.* Peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.

Metode peleburan yang dilakukan peneliti ternyata cukup efektif untuk memahami masalah dan komunitas Gelebak Dalam. Peneliti juga dalam beberapa kali melakukan aktifitas yang semakin membuat kedekatan dengan warga, seperti memancing, mandi di sungai, gotong royong, dan aktifitas keseharian lainnya. Semua itu adalah dalam rangka meleburkan diri dan kemudian bersama-sama dengan warga mulai membentuk kesepahaman tentang masalah yang dijadikan masalah bersama.

Melalui metode yang diterapkan ini, beberapa hal penting yang kemudian berhasil diperoleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman bahwa komunitas warga Desa Gelebak Dalam umumnya adalah komunitas yang homogen dari sisi etnis, sehingga memiliki rasa ikatan kekeluargaan yang kuat. Warga Gelebak Dalam juga memiliki rasa ikatan kekerabatan yang kuat, karena mereka umumnya satu keturunan. Rasa senasib sepenanggungan bisa dirasakan dengan kental, dimana sangat jarang terjadi konflik antar warga, baik hubungan anak muda, ataupun hubungan bertetangga. Termasuk juga fenomena yang banyak ditemukan di tempat lain seperti konflik lahan, konflik batas tanah, ataupun pencurian. Hampir tidak pernah ditemukan. Ini sekali lagi

dipengaruhi oleh kekuatan ikatan sosial yang terjalin sehingga sikap saling tolong menolong masih dirasakan cukup kuat.

2. Pemahaman bahwa sosok pemimpin formal desa, dalam hal Kepala Desa memiliki peran sentral dan sangat penting sekali. Warga Desa Gelebak Dalam sangat patuh dan mengikuti perintah Kepala Desa. Kepatuhan ini termasuk dengan pemimpin informal lainnya seperti Tokoh Agama (Imam Masjid), tokoh adat, para tetua di masyarakat. Peneliti bisa melihat bagaimana ucapan dan perintah pemimpin formal ini diikuti secara baik, walaupun ada perbedaan pendapat atau perdebatan, misalnya dalam forum rapat, kewenangan dan kekuasaan Kepala Desa tetap terlihat dominan. Sangat jarang warga yang menunjukkan sikap menolak secara kuat pandangan Kepala Desa.
3. Pemahaman bahwa bagi masyarakat, masalah karhutla adalah masalah yang memang harus diselesaikan dan sangat mengganggu bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pula pergeseran dalam pemaknaan terhadap karhutla. Jika dulu ada asumsi bahwa karhutla lebih disebabkan oleh faktor cuaca dan kemarau, maka sekarang pemahaman tersebut sudah berubah menjadi keyakinan bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan. Pemahaman seperti ini ternyata tidak muncul begitu saja, namun berproses karena adanya berbagai program yang dilakukan pemerintah terkait karhutla. Adanya kabut asap, pengawasan dari pemerintah desa, serta munculnya solusi-solusi baru tentang karhutla yang bersifat inovatif, menyebabkan masyarakat mulai memahami bahwa karhutla bisa dicegah dan diatasi.
4. Karhutla bisa diselesaikan dengan metode yang inovatif, terutama penggunaan inovasi teknologi.  
Bagi warga Gelebek Dalam, kebiasaan membakar lahan adalah karena tidak adanya alternatif lain dalam membuka lahan baru. Adanya teknologi-teknologi baru, seperti peluncuran Bios 44, pengadaan alat berat, semua bisa menjadi sarana penting dalam menekankan bahwa karhutla bisa dicegah. Masyarakat pada dasarnya tidak ingin adanya

karhutla dan berharap agar ada upaya serius dan kuat dari berbagai pihak untuk mencegah agar kebakaran tidak terjadi.

5. Desa Gelebak Dalam sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan besar untuk mencegah terjadinya karhutla. Potensi ini tampak dari bagaimana pengelolaan lahan dan pengaturan lahan persawahan serta pemukiman. Hampir semua areal lahan di Desa Gelebak Dalam telah diolah dan dimanfaatkan oleh warga, sementara di 2015 dulu masih banyak lahan ini yang dikategorikan terlantar. Lahan yang masih dalam posisi semak belukar, sangat potensial untuk terbakar. Desa Gelebak Dalam sebenarnya terdiri dari kawasan rawa gambut, rawa mineral, dan kawasan daratan. Kawasan ini sebenarnya jika dikelola dengan baik akan bisa memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Potensi inilah yang kemudian dikelola dan diolah oleh Pemerintah Desa Gelebak Dalam dengan berbagai pendekatan yang ada.
6. Pemerintah Desa Gelebak Dalam ternyata memiliki kemampuan dan kapasitas tersendiri dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Kepala Desa memiliki hubungan baik, terutama sekali dengan kalangan militer, baik itu Korem 044 Garuda Dempo dan Kodim Banyuasin. Selain itu Kepala Desa juga memiliki hubungan baik dengan pemerintah di atasnya yaitu Kabupaten Banyuasin serta SKPD di lingkungannya. Hubungan baik yang dijalin dengan berbagai pihak ini menjadi modal besar bagi Kepala Desa untuk kemudian menerapkan berbagai program dan metode pembangunan desanya. Program dan metode ini diterapkan ternyata memiliki korelasi terhadap pencegahan karhutla di Desa Gelebak Dalam.
7. Pemahaman bahwa dalam mengatasi masalah karhutla diperlukan sinergi semua pihak. Sinergi ini didasarkan atas keinginan dan kesadaran bahwa karhutla adalah masalah bersama dan harus dilawan secara bersama pula. Kekuatan penting dari sinergi ini adalah kemampuan dalam melihat berbagai sistem inovasi yang diterapkan, yang kemudian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pengaturan dan pengelolaan lahan di desa Gelebak Dalam.

Pengetahuan yang didapat dari peleburan ini, secara metodologis diperoleh melalui berbagai teknik yang dilakukan, baik dengan wawancara, pengamatan, ataupun keterlibatan secara aktif (*participant observer*). Hal penting juga disini, dengan meleburkan diri, peneliti bisa bersama-sama menggalang kesadaran warga agar bersama-sama pula merencanakan dan melakukan tindakan guna mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla.

### **4.3. Menguraikan identifikasi masalah bersama komunitas**

Tahapan berikutnya setelah melakukan proses peleburan dengan masyarakat adalah dengan melakukan proses pengidentifikasian masalah bersama komunitas. Dalam hal ini, komunitas Desa Gelebak Dalam sudah sama atau membaur bersama peneliti. Warga Desa Gelebak Dalam sudah dilakukan proses penggalangan partisipasi dan kesadaran mereka sudah terbangun dengan baik. Peneliti bisa memunculkan ide tertentu tentang persoalan karhutla, begitu juga dengan masyarakat. Hubungan baik ini sudah terjalin dengan baik sehingga berbagai program bisa dilaksanakan secara bersama-sama.

Identifikasi masalah dilakukan di tahap awal karena akan menunjukkan langkah pertama yang harus dan akan dilakukan oleh komunitas yang ada. Tanpa identifikasi masalah akan sulit untuk masuk ke masalah yang sebenarnya. Ini harus dilakukan secara intensif dari awal proses dilaksanakan.

Identifikasi masalah bersama komunitas merupakan hal penting karena ini menjadi wujud dari proses yang dilakukan. Masalah ataupun persoalan dapat diartikan sebagai tafsir sesuatu yang teramati lewat tanggap rasa, cerapan dan konsep yang ketiganya merupakan cetusan alam fikir dan alam rasa (Notohadiprawiro, 2006). Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. (Husaini dan Purnomo, 2008).

Menurut Ife dan Tesoriero (2008), program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Paradigma

bottom-up yang berpusat pada rakyat terus mendapatkan posisi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan publik, upaya konservasi lingkungan, dan mengelola sumber daya alam yang dapat diterapkan dilapangan (Chambers, 1994).

Proses dalam menguraikan identifikasi masalah bersama komunitas ini dilakukan melalui beberapa proses yaitu :

- a. Mengajak komunitas untuk bersama-sama memahami dan mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi.

Mengajak komunitas disini difokuskan pada persoalan karhutla, yang kemudian berkaitan pula dengan berbagai masalah lainnya. Cara dalam mengajak komunitas ini adalah dengan menghadapkan mereka pada situasi masalah yang nyata. Sementara untuk kawasan Gelebak Dalam, realitas masalah yang tampak sudah sangat nyata sehingga bisa dilakukan upaya-upaya untuk memahami dan mengetahui persoalan karhutla.

- b. Melakukan simulasi-simulasi dalam melihat masalah dan kemudian melakukan identifikasi bersama-sama.

Simulasi-simulasi ini ditekankan pada aspek melihat masalah dan kemudian mencoba melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada. Simulasi ini diarahkan pada aspek pembentukan pemahaman yang lebih kuat tentang karhutla dan kemudian mencari solusi yang bisa diterapkan. Melalui simulasi maka akan bisa dilakukan proses identifikasi masalah dengan baik, karena semua sudah dipertimbangkan dan dilakukan semacam uji coba.

Simulasi-simulasi di Gelebak Dalam dilakukan dengan cara membuat beberapa kemungkinan dan tinjauan terhadap lahan yang ada. Simulasi ini dikhususkan pada simulasi dalam pengolahan lahan, oleh karena itu beberapa metode yang ada, seperti penggunaan teknologi juga dilakukan. Bios 44, mesin traktor, irigasi lahan, pengaturan suplai air, pembuatan kolam sumber air bersih, juga dilaksanakan.





Gambar 10. Melihat langsung lokasi rawan karhutla, termasuk pada wilayah persawahan, sekaligus mendiskusikan simulasi pencegahan.

Gambar di atas menunjukkan proses yang terjadi, terutama sekali melihat langsung dan mencari solusi dalam melihat masalah yang ada. Kawasan persawahan di atas dulunya adalah wilayah yang rentan dan sangat potensial terjadinya karhutla, tetapi kemudian bisa diatasi dengan jalan mengoptimalkan lahan pertanian.

- c. Melakukan proses mendatangi lokasi sebagai tempat yang dianggap memiliki potensi terjadinya karhutla dan kemudian mencari solusi bersama-sama
- Mendatangi lokasi sebenarnya adalah bagian dari simulasi yang dilakukan. Pada saat melakukan simulasi, pada dasarnya juga dilakukan peninjauan terhadap lokasi rawan karhutla. Sambil meninjau juga dilakukan proses identifikasi, terutama diskusi sambil berjalan, sehingga gagasan baru seringkali muncul pada proses dan tahapan ini. Melalui tinjauan ini kemudian bisa muncul beberapa alternatif solusi, yang nantinya bisa bermuara pada solusi yang dilakukan.



### Gambar 11. Meninjau Lokasi Karhutla

Sumber : Dokumentasi Penelitian

- d. Melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai pihak terkait dengan masalah yang dihadapi, dan kemudian berusaha untuk mencari solusi bersama.

Terpenting dari semua proses-proses tersebut adalah melakukan pembicaraan dan tukar pendapat mengenai masalah yang dihadapi. Diskusi ini tidak hanya satu atau dua kali, tetapi cukup sering dan tidak diharuskan terpusat pada satu tempat. Dalam beberapa hal, diskusi ini hanya berlangsung di pinggir sawah atau pinggir kebun. Sembari menunggu pekerjaan pembersihan lahan selesai, biasanya dilakukan ngobrol-ngobrol bersama para warga. Diskusi-diskusi seperti inilah yang kemudian bisa memberikan manfaat mencari solusi. Salah satu solusi seperti penggalian tanah dan kemudian menimbunkan bekas pemotongan pohon pada lubang itu, idenya justru timbul dari diskusi dan ngobrol di pinggir sawah.



Gambar 11. Peninjauan lokasi dan pembuatan lubang penimbunan bekas penebangan

Sumber : Dokumentasi penelitian

Tampak pada gambar di atas bahwa penduduk Gelebak Dalam biasanya melakukan penggalian lobang dan kemudian menimbunkan bekas penebangan ke lubang tersebut. Metode seperti ini diperoleh dari bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol biasa yang kemudian melahirkan ide-ide baru yang bisa dijadikan panduan.

Berdasarkan metode-metode peleburan ke komunitas, sampai pada proses identifikasi masalah-masalah yang dilakukan, setidaknya peneliti bisa sampai pada keyakinan penting bahwa persoalan karhutla di Desa Gelebak Dalam memiliki ragam masalah tersendiri. Beberapa masalah yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Pertama, sudut pandang dalam melihat bahwa karhutla adalah sebuah resiko ketika musim kemarau. Sudut pandang ini muncul dari kenyataan bahwa karhutla selalu terjadi di musim kemarau.

Pada saat kemarau terjadi, warga Gelebak Dalam merasakan kesulitan terutama dalam mencari sumber air bersih dan mengolah lahan. Wilayah yang umumnya rawa-rawa ini, menjadi kering di musim kemarau. Sementara sumber air bersih berasal dari sumur-sumur yang dibuat warga. Kemarau panjang mengakibatkan sumur kering. Kemarau panjang juga menyebabkan warga sulit mengolah lahan karena umumnya lahan warga memiliki sumber air dari tadah hujan.

Pada posisi ini, ketika terjadi karhutla, warga banyak berasumsi bahwa ini adalah karena efek karhutla. Dalam bahasa lain ini sepenuhnya dianggap sebagai fenomena alam. Ucapan yang mengatakan, “namanya kemarau, kebakaran ya bagaimana lagi,” cukup sering terdengar.

Perspektif ini identik dengan kondisi menganggap bahwa alam adalah sesuatu yang memang tidak bisa diintervensi. Segala yang dari alam adalah kondisi yang memang punya korelasi (Florr, 2004).

*Kedua*, asumsi yang mengatakan bahwa karhutla adalah sesuatu yang sangat mengganggu sekali bagi masyarakat. Penekanan disini bukan pada terjadinya kemarau, tetapi lebih pada efek dari kemarau yaitu karhutla. Masalah yang dirasakan dari karhutla adalah kabut asap. Ini diakui oleh warga sebagai sesuatu yang mengganggu.

Terhambatnya aktifitas anak-anak ke sekolah, aktifitas ke lahan pertanian, sungai dan sebagainya, semua berasal dari adanya asap. Masyarakat memahami bahwa karhutla punya efek besar terhadap aktifitas sehari-hari dan juga terhadap kesehatan warga.

*Ketiga*, sudut pandang bahwa karhutla merupakan konsekuensi dari pembukaan lahan di wilayahnya. Sudut pandang ini umumnya muncul di masa lalu, terutama sebelum 2015. Saat itu memang diakui banyak pembakaran lahan terjadi sebagai konsekuensi pembukaan lahan milik warga. Akan tetapi seiring dengan berbagai program yang dilakukan, sudut pandang ini mulai berubah karena warga tidak lagi melakukan pembakaran untuk membuka lahan.

*Keempat*, sudut pandang bahwa karhutla seharusnya tidak terjadi lagi. Asumsi seperti ini muncul belakangan, terutama setelah berbagai program untuk mencegah karhutla dilakukan. Masyarakat mulai meyakini bahwa karhutla bisa dicegah dan karena itu seharusnya tidak terjadi lagi. Keyakinan ini timbul karena memang melihat bahwa mereka mampu melakukan upaya-upaya pencegahan sekaligus upaya deteksi dini dan pemadaman jika api muncul.

Ada asumsi menarik dari warga yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak susah untuk mencegah karhutla, ini terbukti dengan apa yang mereka lakukan. Jika di daerah

lain terjadi karhutla, maka sebetulnya ini adalah masalah ketidakseriusan saja dalam mengelola lahan milik warga.

#### **4.4. Menentukan alternatif solusi**

Identifikasi masalah yang dimunculkan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya pemahaman masyarakat terhadap karhutla adalah sesuatu yang cukup baik, dengan kata lain melalui metode yang dibuat sudah menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang baik dan mengarah pada perbaikan usaha mencegah karhutla.

Dari perbincangan dengan warga dan diskusi yang sering dilakukan, ditentukanlah kemudian beberapa alternatif untuk memecahkan masalah karhutla ini. Alternatif-alternatif ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap kondisi masalah setempat, pengalaman selama ini, serta berbagai kendala lain yang ditemukan sebelumnya.

*Pertama*, menggunakan teknologi untuk membantu petani dalam membuka lahan baru yang bersifat cepat dan mudah. Teknologi ini tidak sederhana, setidaknya untuk membuka lahan diperlukan adanya alat berat sejenis Ekskavator yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Solusi ini dimunculkan untuk membantu petani dalam memaksimalkan semua lahan yang ada, selain itu bisa membantu dalam mengatasi masalah pengaturan pengairan serat jalur irigasi di sawah-sawah warga. Berbagai kemudahan akan diperoleh warga jika sudah memiliki sejenis alat ini. Persoalannya adalah bagaimana cara mendapatkan alat ini, disinilah masalah terjadi, karena harga sebuah ekskavator cukup mahal. Perbincangan dan diskusi dengan warga cukup ketat tentang hal ini, sampai kemudian Kepala Desa mengambil keputusan bahwa alat berat itu akan dibeli dengan cara apapun, jika perlu dengan meminjam ke Bank atau ke pihak lain. Dalam hal ini, ada kesadaran bahwa masalah karhutla bisa diatasi salah satunya dengan mekanisasi lahan pertanian.

*Kedua*, melakukan usaha-usaha tertentu agar lahan pertanian yang dimiliki warga menjadi subur, layak tanam dengan hasil memuaskan, dan tentu saja berbiaya murah. Lagi-lagi ini membutuhkan teknologi, tetapi tidak mungkin dengan cara tradisional atau menggunakan produk kimia. Penggunaan produk kimia memang masih dilakukan warga tetapi ini tidak dianjurkan karena kemudian membuat lahan menjadi sangat tergantung

dengan suplai bahan kimia. Penggunaan bahan kimia yang lazim dilakukan warga adalah untuk pemupukan dan penyemprotan hama. Hal ini memang berdampak cepat tetapi kemudian ternyata berbiaya tinggi dan tidak menguntungkan. Oleh karena itu,, diperlukan metode lain yang lebih murah dan cepat.

Kerjasama dan jaringan yang dimiliki Kepala Desa dengan berbagai instansi ternyata kemudian berpengaruh besar. Melalui kerjasama dengan Korem 044 Garuda Dempo di tahun 2016, digunakanlah produk Bios 44, sebuah cairan mikroorganisme yang fungsinya mampu menggantikan keberadaan pupuk kimia. Bios 44 bisa diperoleh dengan mudah dan murah karena tersedia di Korem 044 Garuda Dempo.

*Ketiga*, persoalan karhutla terkait dengan aktifitas membakar lahan yang bisa saja dilakukan karena faktor kesengajaan. Oleh karena itu, metode patroli dan penjagaan wilayah dari kemungkinan adanya yang melakukan sabotase membakar lahan juga harus diantisipasi. Patroli dengan menyusun penjagaan dan kesiapsiagaan di musim kemarau harus dilakukan.

*Keempat*, melakukan upaya penegakan hukum. Caranya adalah siapa yang membakar lahan, ditangkap dan diserahkan ke Polisi. Ini adalah metode yang dianggap warga bisa memberikan efek jera kepada pihak lain, bahwa membakar lahan khususnya di Gelebak Dalam akan berakibat tidak baik. Peringatan ini berlaku dengan semua warga, baik warga Gelebak Dalam sendiri ataupun pihak luar. Sekali lagi, solusi ini diberikan adalah untuk memberikan efek jera sehingga tidak ada yang berani untuk melakukan usaha membakar lahan.

*Kelima*, memperbanyak papan pengumuman dan pemberitahuan tentang larangan dalam membakar lahan. Jika diperlukan bisa dipasang di semua lokasi strategis yang bisa dilihat langsung oleh warga. Tetapi cara penggunaan pengumuman seperti ini hanya untuk memberikan peringatan saja, ini diakui warga, bahwa terpenting sebetulnya adalah mencegah membakar, bukan melarang membakar. Larangan membakar hanya akan membuat orang takut dan kemudian mencari-cari cara agar bisa membakar, karena itu perlu dilihat bahwa ini adalah sekedar mengingatkan semata.

*Keenam*, mengusahakan adanya peluang mata pencaharian lain dari warga di musim kemarau, sehingga tidak hanya tergantung pada pembukaan lahan baru. Usaha

yang direncanakan ini bisa membuat masyarakat kemudian tidak lagi membakar lahan tapi disibukkan dengan usaha lain yang lebih produktif. Usaha yang diarahkan tersebut bisa berupa peternakan ikan, kambing/sapi, usaha kerajinan pengolahan ikan asin/sale, dan berbagai usaha kreatif lainnya. Usaha jenis ini dianggap pekerjaan sampingan yang hasilnya sebetulnya cukup menjanjikan. Warga juga percaya bahwa banyak potensi yang dimanfaatkan di desa yang bisa menjadi sumber bahan baku utama. Hal ini akan sangat membantu, tinggal bagaimana mengusahakan agar mekanisme ini bisa berjalan dengan baik.

Masalah bagi warga bukanlah ketidakmampuan tapi lebih kepada ketidaksadaran atau kurang merasa perlu melakukan usaha tersebut. Hal ini biasanya akan terjawab ketika sudah ada contoh praktis yang berhasil dari warga lain. Oleh karena itu perlu dibentuk kelompok-kelompok khusus yang nantinya akan mendorong terjadinya pengelolaan dan pembinaan usaha ekonomi kreatif dari warga. Di musim kemarau hal ini akan dirasakan penting sekali karena warga sudah punya hasil usaha sendiri dan kemudian perhatiannya akan teralihkan dari godaan untuk membuka lahan pertanian baru, apalagi dengan membakar lahan.

*Ketujuh*, larangan bagi warga untuk menjual lahan milik mereka ke perusahaan perkebunan atau swasta lainnya. Di Gelebek Dalam, pengakuan dari Kepala Desa, banyak perusahaan swasta yang datang dan menawarkan akan membeli lahan milik warga dalam jumlah besar. Tujuannya untuk dibuka kebun kelapa sawit baru. Harga yang ditawarkan juga cukup tinggi, di atas harga pasar. Tetapi Kepala Desa sudah menjelaskan kepada warga agar tidak membeli lahan milik warga, karena jika itu dilakukan akan menyebabkan warga kehilangan lahan dan perusahaan kemudian secara perlahan-lahan akan “berkuasa” di daerah ini.

Dalam proses menentukan alternatif solusi di atas, prinsip-prinsip partisipasi selalu dikedepankan. Untuk itu dalam prosesnya, peneliti bersama dengan masyarakat melakukan proses identifikasi dan penentuan alternatif solusi masalah. Metode yang diterapkan adalah dengan beberapa langkah yaitu :

1. Diskusi bersama tentang masalah karhutla

Diskusi yang dilakukan ini bersifat informal dan formal. Yang rutin dilakukan adalah diskusi informal, yaitu diskusi di tempat-tempat berkumpulnya warga, bisa di masjid, di sawah dan di rumah-rumah penduduk. Pada diskusi ini dibicarakan berbagai hal terkait karhutla serta pengolahan lahan masyarakat. Disinilah kemudian ditemukan beberapa ide tentang masalah karhutla dan alternatif apa yang akan diterapkan sebagai solusinya.

Dalam proses riset ini, kuantitas pelaksanaan diskusi informal cukup banyak, setidaknya ada 5 kali bincang-bincang informal yang dilakukan bahkan bisa lebih, karena dilangsungkan dimana saja. Dalam diskusi ini biasanya mengemuka banyak hal tentang soal karhutla, termasuk tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses penanggulangan karhutla.

Pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi ini biasanya adalah anggota masyarakat, aparat desa dan siapa saja yang bisa hadir. Peneliti memposisikan diri sebagai orang yang mendengarkan dan sesekali memberikan respon terhadap apa yang diperbincangkan.

Proses diskusi bisa berlangsung begitu saja tanpa harus dipersiapkan sama sekali. Dalam kegiatan keliling desa, diskusi kadang kala terjadi. Masyarakat yang sedang mengolah lahan adalah aktifitas perbincangan yang sering dan kerap dilakukan.





Gambar 12. Diskusi informal dengan anggota masyarakat

Sumber : Dokumentasi penelitian

Tampak dari gambar di atas bahwa proses diskusi berlangsung di bawah rumah panggung sembari ngobrol-ngobrol bersama masyarakat. Pada saat itu, posisi peneliti sudah dianggap menjadi bagian dari masyarakat sehingga proses berlangsung cair dan bisa berlangsung akrab.

2. Melakukan proses pemetaan masalah

Proses pemetaan masalah biasanya juga berlangsung saat diskusi informal berlangsung. Sembari bincang-bincang biasanya akan ada ide-ide baru seputar peta masalah. Disini muncul pendapat bahwa masalah karhutla sudah sangat akut dan melibatkan banyak pihak, termasuk unsur pemerintah, TNI-Polri, dan anggota masyarakat sendiri. Pihak pemerintah kabupaten juga dianggap berwenang dalam mengatasi masalah ini. Pemetaan masalah dilengkapi dengan beberapa alat bantu seperti karton, kertas dan sebagainya. Tetapi ini biasanya dipakai pada forum-forum diskusi formal.

3. Proses memberikan rangking masalah

Memberikan rangking masalah juga dilakukan. Biasanya ini juga dalam forum-forum diskusi informal. Rangking masalah ini menempatkan kemudian bahwa masalah keterbatasan masyarakat dalam mengolah lahan sebagai masalah terbesar yang harus diselesaikan.

Beberapa masalah yang muncul dalam diskusi ini adalah soal kekeringan, sumber air, pupuk, hasil panen, bibit padi, sektor perikanan, dan karhutla. Semua itu dilakukan prosesnya dan kemudian ternyata aspek pertanian ternyata dianggap masalah terbesar dan harus diselesaikan. Soal pertanian ini berkaitan dengan masalah karhutla, oleh karena itu penyelesaiannya dianggap harus bisa dilakukan secara bersamaan.

Rangking masalah terkadang menggunakan alat peraga seperti kartu, kartun, barang dan benda lain yang ada disekitarnya, termasuk suasana yang berlangsung. Masyarakat lebih mudah memahami ini dan kemudian bisa memahami masalah yang sebenarnya.

Rangking masalah merupakan tahapan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena akan menunjukkan proses yang dilalui masyarakat betul-betul berdasarkan pada kondisi yang ada dan mereka memang terlibat sejak dari awal.

Perdebatan kadang muncul dalam proses ini, ada yang protes dan ada yang setuju. Semua ini adalah bagian dari rangking masalah yang kemudian menunjukkan bahwa masing-masing memang memiliki potensi masalah tersendiri untuk diselesaikan.



### Gambar 13. Diskusi Merangking Masalah

Proses dalam menentukan masalah dan kemudian sampai pada solusi selalu berlangsung secara santai dan terkadang tidak disadari bahwa itu adalah bagian dari proses mencari solusi. Hanya saja pada akhirnya nanti ini akan dibawa ke forum diskusi bersama perangkat desa untuk menetapkan solusi terbaik yang akan diambil.

#### 4. Peninjauan lokasi

Untuk memastikan masalah dan solusi yang ditetapkan sudah dianggap pas dan cocok, biasanya dilakukan peninjauan lokasi. Bersama-sama warga, dikunjungi lokasi yang rentan karhutla sekaligus melihat apakah solusi ini bisa diambil atau tidak. Ini untuk mencocokkan lokasi yang ada sesuai kasus yang dihadapi.

Setidaknya hasil dari peninjauan lokasi, ada beberapa daerah yang kemudian dianggap bermasalah dan sering terjadi karhutla. Terdapat tidaknya ada 8 titik rawan karhutla, dan sebagian sudah diolah oleh warga. Lokasi-lokasi ini berada di pinggiran desa dan memang banyak rawa gambut dangkal serta banyak ditumbuhi belukar.



#### Gambar 14. Lokasi Rawan Karhutla

Sumber : Dokumentasi penelitian

Photo di atas menunjukkan daerah rawan karhutla yang dulunya sering terbakar. Daerah ini ditinjau bersama-sama warga dan kemudian melahirkan berbagai pendapat tentang masalah yang harus diselesaikan. Daerah Gelebak Dalam memang memiliki banyak lokasi yang rentan karhutla, walaupun itu berada di pinggir desa, bukan dekat pemukiman.

#### 5. Diskusi kesiapan sumber daya

Diskusi soal kesiapan sumber daya pada dasarnya membahas tentang apa yang dimiliki desa dan apa yang tidak dimiliki. Selanjutnya dibahas mengenai peluang apa yang dimiliki dan bagaimana mengatasinya. Polanya adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Dari analisis yang dilakukan, setidaknya desa sudah memiliki kekuatan berupa sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kebijakan. Ini bisa dimaksimalkan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.

Sumber daya yang sudah dimiliki desa saat ini adalah :

- a. SDM memadai dari sisi jumlah dan kualitas
- b. Kondisi bentang alam yang memungkinkan pencegahan karhutla, karena adanya sumber air dari sungai yang mengalir mengelilingi desa
- c. Metode bertani warga yang mengandalkan tadah hujan menjadi sumber daya untuk memaksimalkan lahan

- d. Kesadaran warga bahwa membakar lahan atau lahan terbakar akan mengganggu banyak pihak sudah cukup baik
- e. Dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah desa dan juga pemerintah kecamatan atau kabupaten.
- f. Adanya dukungan dari pihak-pihak lain, termasuk dari TNI, perguruan tinggi, maupun pihak swasta
- g. Adanya bantuan dana desa yang sebagiannya bisa dimaksimalkan untuk mengatasi masalah karhutla
- h. Terdapatnya berbagai upaya inovatif dari sebagian warga desa untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang dimiliki
- i. Sudah dimilikinya beberapa sarana prasarana dasar di masyarakat petani yaitu, traktor, hand traktor, mesin penggiling padi, filter air nusantara, termasuk Bios 44.

Semua proses di atas dilakukan oleh peneliti bersama-sama dengan masyarakat dengan berbagai metode yang sifatnya partisipatif. Memang tidak bisa dilakukan secara cepat, tetapi berproses dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini peneliti memiliki keuntungan karena sebelumnya sudah cukup mengenal lokasi desa Gelebak Dalam sehingga proses bisa dilakukan secara lebih mudah.

Berdasarkan penjelasan tentang proses yang dilalui di atas maka bisa dikeluarkan beberapa rekomendasi yang dilahirkan bersama komunitas tentang pencegahan karhutla ini. Rekomendasi yang disepakati disini adalah :

- a. Melakukan patroli rutin sesama warga di musim kemarau sebagai antisipasi terjadinya karhutla
- b. Melakukan proses pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat yang sudah dimiliki desa melalui Kepala Desa
- c. Membangun parit-parit pengaliran air (sistem irigasi sederhana) untuk menyalurkan air ke lokasi-lokasi persawahan dan perkebunan warga
- d. Menggiatkan penggunaan inovasi Bios 44 untuk penyuburan lahan pertanian

- e. Menggiatkan sektor perikanan sebagai alternatif mata pencaharian warga selain bersawah
- f. Mendorong warga agar membuka lahan atau menjaga lahan yang tidak diolahnya sehingga aman dari kebakaran di musim kemarau
- g. Memperbanyak jejaring keluar desa guna memaksimalkan pengadaan dan kesiapan sarana prasarana desa dalam mencegah terjadinya karhutla, misalnya penambahan unit traktor, mesin perontok padi, dan sebagainya.

Rekomendasi-rekomendasi di atas adalah solusi-solusi yang disepakati warga untuk dilakukan dalamantisipasi masuknya musim kemarau. Rekomendasi tersebut dilahirkan dari berbagai perbincangan dan metode dampingan yang dilakukan sehingga bisa dilaksanakan secara bersama-sama.

#### **4.5. Penerapan Solusi**

Setelah masing-masing rekomendasi disepakati, maka langkah berikutnya adalah penerapan solusi. Motor penggerak dalam pelaksanaan solusi ini adalah Kepala Desa, sebagai pemimpin formal di Desa Gelebak Dalam. Beberapa langkah yang diterapkan oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan patroli rutin sesama warga di musim kemarau sebagai antisipasi terjadinya karhutla

Mekanisme yang dilakukan untuk solusi ini adalah dengan cara :

- a) Membagi masyarakat, khususnya laki-laki dewasa dalam kelompok tertentu. Pengelompokan ini mirip seperti pembagian tugas pos ronda, yaitu dibagi 10 orang per kelompok yang aktifitasnya setiap hari secara bergiliran. Dalam pelaksanaannya, kelompok ini tidaklah bersiaga setiap saat, namun mereka tetap melakukan pemantauan keadaan. Warga lain sebenarnya tetap siaga, jika keadaan darurat maka yang lain segera membantu. Fungsi kelompok ini adalah sebagai pendeteksi dini dan kemudian mengabarkan ke warga lainnya.
- b) Tiap-tiap kelompok diminta mengaktifkan telepon genggam masing-masing dan segera melaporkan jika ada kondisi kebakaran

- c) Setiap anggota kelompok bertanggungjawab terhadap wilayah terdekat dari kebunnya masing-masing, sehingga deteksi dini bisa dilaksanakan dengan cepat.
- b. Melakukan proses pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat yang sudah dimiliki desa melalui Kepala Desa  
Mekanisme yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah :
  - a) Mempersiapkan alat berat (ekscavator) pada posisi stand by. Alat berat ini dilengkapi dengan petugas khusus yang akan mengoperasikannya
  - b) Untuk membiayai operasional alat berat, masing-masing warga yang menggunakannya dibebankan biaya pembelian BBM sesuai yang dikeluarkan dan biaya sopir.
  - c) Kepala Desa dan tim patroli melakukan pengawasan terhadap aktifitas warga, sehingga tidak ada lagi warga yang membuka lahan dengan membakar.
- c. Membangun parit-parit pengaliran air (sistem irigasi sederhana) untuk menyalurkan air ke lokasi-lokasi persawahan dan perkebunan warga
  - a) Menggunakan alat berat untuk membuat saluran parit ke persawahan dan perkebunan warga
  - b) Semua biaya yang dikeluarkan, dibebankan pada kas desa dengan menggunakan anggaran yang dimiliki desa
  - c) Warga lain ikut membantu, khususnya warga yang lahannya akan dilalui oleh parit-parit yang dibuat.
- d. Menggiatkan penggunaan inovasi Bios 44 untuk penyuburan lahan pertanian
  - a) Melakukan kerjasama dan tetap berkoordinasi dengan Korem 044 Garuda Dempo sebagai pemasok Bios 44
  - b) Melakukan sosialisasi terus ke warga agar menggunakan Bios 44 untuk teknologi pertanian yang dilakuakn
  - c) Bios 44 digunakan secara gratis, tidak dibebankan biaya apapun
- e. Menggiatkan sektor perikanan sebagai alternatif mata pencaharian warga selain bersawah
  - a) Melakukan kerjasama dengan Korem 044 Garuda Dempo untuk memasok Bios 44 sebagai pakan ternak ikan
  - b) Mendorong warga yang lahannya memungkinkan untuk dibuat kolam ikan

- c) Kerjasama dengan Pemkab Banyuasin untuk memasok bibit ikan, khususnya ikan nila dan ikan lele
- d) Pada jangka panjang membuat kelompok petani ikan dan diarahkan pada industri ikan kemasan, baik berbentuk ikan asin ataupun ikan sale
- f. Mendorong warga agar membuka lahan atau menjaga lahan yang tidak diolahnya sehingga aman dari kebakaran di musim kemarau
  - a) Melakukan sosialisasi ke warga lain agar memanfaatkan lahannya secara optimal. Pelaksana sosialisasi ini adalah Kepala Desa dibantu oleh kelompok-kelompok tani yang sudah ada.
  - b) Memfasilitasi warga untuk membuka lahan dengan cara penyediaan alat berat dan pembukaan jalan menuju kebun. Beberapa lokasi belum memiliki jalan yang bisa dilewati kendaraan roda 4, oleh karena itu pemerintah desa memfasilitasi dengan membuat jalan ke lokasi yang ada
  - c) Memfasilitasi pembuatan irigasi sederhana sehingga persediaan air memadai di masing-masing lokasi.

Penerapan solusi di atas dilakukan mulai dari masuknya musim kemarau tahun 2019 ini dan terus berlanjut hingga saat ini. Ada keuntungan yang didapatkan, karena warga desa ini pada dasarnya sudah menjadi binaan dari Korem 044 Garuda Dempo, sehingga sudah memiliki pemahaman terhadap pencegahan karhutla. Peneliti dalam proses ini berusaha menggalang partisipasi masyarakat, sehingga ide dan gagasan tentang karhutla tidak lagi didominasi oleh Kepala Desa semata.

Pada saatnya, peneliti akan keluar dari lokasi Desa Gelebak Dalam, dimana saat dirasakan bahwa warga desa sudah mandiri dan sistem pencegahan karhutla sudah berjalan dengan baik. Proses ini masih akan terus berlangsung, kendati pelaksanaan riset secara administratif telah dianggap selesai.

Satu tahapan yang belum dilakukan adalah proses evaluasi dan refleksi. Hal ini hanya bisa dilakukan saat mekanisme sudah dianggap selesai. Evaluasi dan refleksi secara rutin sebenarnya sudah dilakukan seiring dengan pelaksanaan program di masyarakat. Hanya saja evaluasi secara total belum bisa dilaksanakan, karena proses masih terus berlangsung.



Jika dilihat dari kajian teoritisnya maka semua proses yang dilakukan adalah bagian dari pengorganisasian komunitas atau membangun sebuah komunitas. Stall dan Stoecker (1998), pengorganisasian komunitas merupakan sebuah proses pembangunan komunitas yang dapat dimobilisasi. Hal ini meliputi membangun jaringan orang-orang, mengidentifikasi cita-cita bersama, dan siapa yang dapat terlibat dalam tindakan/aksi sosial untuk mencapai cita-cita bersama tersebut. Pengorganisasian komunitas mengacu kepada keseluruhan proses pengorganisasian hubungan, pengidentifikasian isu, mobilisasi orang untuk isu tersebut, serta mengurus dan mempertahankan organisasi. Pengorganisasian komunitas juga merupakan suatu proses membangun kekuatan yang melibatkan orang-orang dalam mendefinisikan persoalan-persoalan suatu komunitas, mendefinisikan persoalan yang ingin diselesaikan, solusi yang diangkat, dan metode yang digunakan untuk melaksanakan solusi persoalan komunitas tersebut<sup>40</sup>. Pengorganisasian komunitas merupakan salah satu proses yang memobilisasi komunitas untuk mencapai atau berbuat tindakan bersama demi kepentingan komunitas dan memberikan dampak bagi komunitasnya.

Proses pengorganisasian komunitas ini dapat meningkatkan modal sosial baik bagi individual dengan cara meningkatkan dan memperkuat relasi di antara sesama dan dengan membangun kepercayaan dan mengakui kepentingan bersama (Chaskin, 2001). Terpenting dengan melakukan pengorganisasian komunitas, maka akan diperoleh sebuah kekuatan bersama yang besar dan kuat yang kemudian mampu melahirkan kebijakan-kebijakan untuk perubahan bersama. Gelebak Dalam sudah menunjukkan bagaimana pengorganisasian tersebut bisa berjalan dengan sama-sama memahami bahwa kondisi yang ada memang memerlukan perhatian sangat serius. Kesamaan dalam memandang realitas adalah kata kuncinya, disamping memang peran sentral seorang Kepala Desa yang kemudian bisa memberikan arahan dan contoh kepada warga. Peran tokoh opini tampak memiliki pengaruh, walaupun warga sebetulnya bisa mencarikan sumber informasi lainnya.

---

<sup>40</sup> Nurulitha Andini, *Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No. 3, Desember 2013, hlm.173 - 188*

Gelebak Dalam sudah menunjukkan kemajuan dalam proses ini, dimana sebetulnya persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan asalkan ada kesamaan sudut pandang dan kesadaran dalam melihat masalah. Pada kasus karhutla, kesadaran bahwa ini adalah masalah bersama menjadi titik panutan yang paling mendasar.

## **BAB V**

### **CAPAIAN PENDAMPINGAN**

Pelaksanaan pendampingan komunitas di Desa Gelebak Dalam telah dilakukan dengan beberapa metode dan pendekatan. Penjelasan rincinya sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, yaitu *road map* pendampingan yang dilakukan. Semua tahapan tersebut dilakukan secara simultan dan dalam beberapa hal terkadang dilakukan secara bersamaan. Secara formal, kegiatan pendampingan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, tetapi proses yang dilakukan sebetulnya sudah berlangsung setahun sebelumnya, dimana peneliti sudah terbiasa masuk ke wilayah ini.

Selama proses dampingan yang dilakukan, setidaknya terdapat beberapa capaian, yang jika dilihat dari perubahan secara kualitatif menunjukkan beberapa indikasi penting :

1. Telah munculnya sikap kesadaran warga bahwa aktifitas membakar lahan adalah aktifitas yang membahayakan tidak hanya bagi warga desa, tapi juga masyarakat lainnya.

Indikasi keberhasilan membangun kesadaran ini tampak dari aktifitas warga sehari-hari yang sudah menunjukkan prilaku tidak lagi membakar lahan dan senantiasa menjaga serta melihat perkembangan lahan diwilayahnya. Jika dulu warga cenderung tidak peduli dengan kondisi lahan, maka sekarang dengan masuknya musim kemarau, mereka mulai melakukan pembenahan dan selalu berjaga-jaga. Aktifitas ini kemudian menjadi rutinitas dan mulai terbiasa dengan kehidupan menjaga lahan dan menjaga agar tidak ada titik api. Obrolan-obrolan sehari-hari juga menunjukkan kondisi dimana isu karhutla sering dibahas dan dibicarakan warga.

2. Membiasakan diri untuk mengolah lahan dengan menggunakan metode-metode teknologi ramah lingkungan.

Pola ini biasanya ditunjukkan dengan pemanfaatan Bios 44 dan juga penggunaan mesin dalam mengolah lahan. Bios 44 adalah cairan mikroorganisme yang diracik dari campuran berbagai bahan baku seperti bakteri dan lainnya, yang kemudian dicampur dengan air dalam takaran tertentu. Cairan Bios ini kemudian disebar ke lahan-lahan yang ada, yang kemudian terbukti ampuh dalam merapatkan rongga-rongga lahan gambut, menetralkan sekaligus meningkatkan Ph tanah, sehingga lahan yang sebelumnya tandus dan dianggap tidak subur, menjadi layak untuk ditanami. Lahan gambut yang sebelumnya tidak bisa diolah warga, dengan menggunakan Bios 44 kemudian bisa dimaksimalkan. Hasilnya adalah lahan gambut tidak lagi terbakar di musim kemarau.

Warga Gelebak Dalam, melalui pendampingan yang dilakukan, serta usaha yang dilakukan Kepala Desa dengan kerjasama bersama Korem 044 Garuda Dempo, bisa memunculkan kebiasaan ini kepada warga. Alhasil pemanfaatan pupuk kimia yang lazim dipakai, juga menjadi berkurang dan bahkan bisa ditekan semaksimal mungkin.

3. Munculnya keyakinan dari warga desa bahwa karhutla bisa diatasi dan lahan gambut bisa diolah.

Keyakinan ini tampak dari bagaimana kemudian warga desa secara bersama-sama bisa melakukan usaha mencegah karhutla. Karhutla di 2019 tidak ditemukan di desa ini, hal yang berbeda jika dilihat tahun 2014 dan 2015. Hal ini kemudian menimbulkan keyakinan tersendiri pada warga bahwa mereka ternyata bisa. Sektor ekonomi masyarakat juga ikut terbantu karena banyak lahan yang sebelumnya tidak bisa diolah, sekarang bisa dimaksimalkan. Efek terbesar adalah kepercayaan diri yang ada di komunitas. Hal ini adalah hasil dari proses panjang sebelumnya, baik sebelum peneliti masuk maupun saat peneliti berada di tengah mereka.

4. Keyakinan dari warga bahwa melalui kebersamaan dan memunculkan ide-ide sederhana bisa menjadi hasil yang besar.

Ide-ide sederhana tersebut misalnya, memanfaatkan lahan dan perairan yang selama ini dianggap tidak bermanfaat. Melalui pendampingan dan teknologi Bios 44 hal-hal tersebut bisa dimaksimalkan. Selain itu, rasa kebersamaan juga muncul, dimana warga melihat bahwa kebersamaan dan saling gotong royong ternyata masih tetap dibutuhkan. Hal ini menjadi modal sosial yang kuat dalam mendorong percepatan pembangunan di Gelebak Dalam nantinya. Terpenting adalah adanya kemampuan dari warga desa bahwa mereka mampu melakukan itu.

Keberhasilan capaian pendampingan di atas memang belum sampai ke tahap evaluasi dan refleksi, tetapi solusi yang dipilih berdasarkan alternatif-alternatif yang ada sudah menunjukkan hasil maksimal. Konsep partisipasi bisa muncul karena memang sudah ada bukti konkrit dari apa yang dilakukan.

Keberhasilan seperti di atas memang sebuah capaian dari program pemberdayaan sebuah komunitas. Widjajanti<sup>41</sup> yang sudah melakukan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan lindung mengatakan bahwa keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Secara sosial, masyarakat sekitar kawasan hutan lindung sampai saat ini tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang dapat diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha yang secara sosial dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai. Ketidakberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi menjadi salah satu ganjalan bagi masyarakat untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sesama saudaranya yang telah berhasil. Kondisi inilah yang perlu dipahami dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan penyusunan program, agar

---

<sup>41</sup> Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15-27

setiap kebijakan dan program tentang pengaturan pengelolaan hutan yang diambil tetap memperhatikan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan lindung.

Capaian pendampingan yang dilakukan bisa pula dikonfirmasi dengan hasil dampingan dari beberapa peneliti lain dalam topik berbeda yang memang kemudian menunjukkan hasil signifikan.

Zaki Mubarrak<sup>42</sup> menjelaskan tentang hasil risetnya yaitu pada program PNPM Mandiri di Desa Sastrodirjan. Dikatakannya bahwa kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat di Desa Sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya. Temuan yang didapatkan adalah perubahan kesadaran masyarakat tidak berhubungan dengan usia responden, tingkat pendidikan dan perannya dalam PNPM, namun memiliki hubungan dengan jenis kelamin, dimana peran dan keterlibatan perempuan masih rendah dan belum cukup optimal dalam mendukung pembangunan di tingkat komunitas.

Masyarakat Desa Sastrodirjan telah menyadari konsep pemberdayaan dan mengerti untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya, namun untuk menuju tahapan pembiasaan masih membutuhkan pembelajaran yang lebih banyak sehingga mereka benar-benar siap untuk bertanggungjawab secara penuh dalam pengelolaan pembangunan komunitasnya. Masyarakat juga telah siap untuk melanjutkan program pemberdayaan yang selama ini telah berjalan, meskipun secara mandiri hal tersebut belum dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan masih membutuhkan pendampingan yang intensif dari pihak luar serta bantuan pendanaan secara kontinyu.

Riset dari Ahmad Sururi<sup>43</sup> yang melihat tentang pemberdayaan masyarakat melalui program infrastruktur menegaskan bahwa soal keterlibatan masyarakat menjadi penting. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu prinsip pemberdayaan

---

<sup>42</sup> Zaki Mubarrak, 2010, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*, Tesis, Universitas Diponegoro.

<sup>43</sup> Ahmad Sururi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3 No 2, Januari-April

masyarakat berdasarkan analisis kerja sama partisipasi dan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis demokrasi dalam penerapan ilmu, hal ini disebabkan karena :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna pemberdayaan masyarakat dan keberadaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP);
- b. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh fasilitator masyarakat dan perangkat kelembagaan desa dalam memberikan informasi kegiatan dan Kurangnya kesadaran masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat menyangkut kondisi dan lingkungannya
- c. Sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam pengambilan keputusan
- d. Adanya budaya kepatuhan warga masyarakat terhadap penguasa wilayah (tokoh formal maupun informal) yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam kebijakan pengambilan keputusan.

Sururi juga mengatakan bahwa fasilitator haru memberikan kesempatan pendidikan non formal kepada masyarakat sebagai upaya penguatan modal sosial dengan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekaligus mengurangi peranan fasilitator dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan intensitas kegiatan kepada masyarakat.

Fasilitator masyarakat harus mendorong masyarakat untuk berani berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat, ide dan gagasan dalam proses pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik budaya, nilai-nilai sosial dan peraturan dalam masyarakat.

Pada konteks Desa Gelebak Dalam, keberhasilan capaian sangat ditentukan oleh beberapa hal penting.

*Pertama*, lamanya proses peleburan yang dilakukan, sehingga peneliti sudah dianggap bagian dari masyarakat. Dalam penelitian partisipatif, peleburan diri peneliti adalah kunci terpenting. Saat ini sudah berhasil dilakukan, maka sebenarnya proses pendampingan sudah berjalan 50%. Oleh karena itu, keberhasilan proses peleburan ini menjadi penting sekali dilakukan.

*Kedua*, metode yang diterapkan selalu menekankan partisipasi warga sehingga masyarakat merasa memiliki terhadap program yang dibuat. Rasa keterikatan warga dengan program yang ada harus terus dibina dan itu hanya bisa dilakukan saat warga terlibat dan ikut dalam proses yang dilakukan. Riset ini menekankan sekali bahwa warga harus terlibat dari awal, dan itu bisa dilakukan melalui berbagai metode pendekatan yang sifatnya persuasif.

*Ketiga*, peran Kepala Desa yang memang punya keinginan kuat untuk memajukan daerahnya dan menghentikan segala hal yang bisa menyebabkan terjadinya karhutla. Tokoh harus dijadikan patokan, dan Kepala Desa bisa dijadikan panutan karena ia sendiri memiliki prinsip dalam setiap pembangunannya yaitu, menunjukkan pada orang luar bahwa masyarakat desa juga bisa melakukan usaha pencegahan karhutla, karena itu jangan senantiasa selalu menuduh bahwa masyarakat adalah penyebab karhutla.

*Keempat*, adanya masukan teknologi-teknologi terapan yang baru sehingga masyarakat bisa melihat sendiri keberhasilan yang sudah ada dan bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Teknologi utama adalah Bios 44 dan penggunaan ekskavator untuk mengolah lahan. Kepala Desa sendiri berani membeli ekskavator, walaupun dengan cara mencicil dari Bank. Ia sekali lagi berhasil membuktikan bahwa warga itu mampu.

*Kelima*, dukungan masyarakat yang memang sudah melek teknologi dan memiliki pemikiran yang terbuka terhadap berbagai masalah dan kondisi yang ada.

Keberhasilan-keberhasilan seperti ini, tentu saja baru pada tahap awal pendampingan. Capaian akhir belum akan diperoleh karena karakteristik penelitian partisipatif memang tidak ada akhirnya. Manusia bisa berubah karena berbagai hal, karena itu perlu metode evaluasi dan monitoring sekaligus melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai. Proses ini diperlukan agar nantinya bisa ditunjukkan metode dan capaian yang akan dicapai.

Desa Gelebak Dalam memang tidak akan ditinggalkan. Proses tahap ini memang sudah berakhir, tetapi demi menjaga kontinuitas dan keberlanjutan program maka pendampingan berikutnya tetap diperlukan, meskipun intervensi peneliti tidak terlalu banyak.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan tampak bahwa proses pendampingan komunitas Desa Gelebak Dalam melalui tahapan tertentu yaitu pengenalan masalah dan pendalaman masalah, peleburan dengan komunitas, menentukan alternatif solusi masalah, dan menerapkan alternatif solusi masalah. Program ini sampai sejauh ini sudah berhasil membangun partisipasi masyarakat untuk kemudian membuat usaha-usaha bersama dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya karhutla.

Beberapa hal yang menjadi program komunitas dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla adalah :

- h. Melakukan patroli rutin sesama warga di musim kemarau sebagai antisipasi terjadinya karhutla
- i. Melakukan proses pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat yang sudah dimiliki desa melalui Kepala Desa
- j. Membangun parit-parit pengaliran air (sistem irigasi sederhana) untuk menyalurkan air ke lokasi-lokasi persawahan dan perkebunan warga
- k. Menggiatkan penggunaan inovasi Bios 44 untuk penyuburan lahan pertanian
- l. Menggiatkan sektor perikanan sebagai alternatif mata pencaharian warga selain bersawah
- m. Mendorong warga agar membuka lahan atau menjaga lahan yang tidak diolahnya sehingga aman dari kebakaran di musim kemarau

Semua program tersebut dilandasi oleh semangat partisipasi untuk menciptakan desa yang bebas karhutla. Pendampingan ini menunjukkan tahapan-tahapan dan peta jalan yang menunjukkan bahwa proses penggalangan partisipasi masyarakat untuk kemudian menciptakan perubahan di masyarakat bisa dilakukan dengan baik.

Kesulitan memang ditemukan dalam proses pendampingan, dimana peran Kepala Desa sangat dominan, sehingga partisipasi murni dari unsur masyarakat tidak muncul secara baik. Partisipasi lebih banyak karena dorongan dari Kepala Desa, walaupun

memang pada dasarnya masyarakat menyadari bahwa masalah karhutla adalah masalah bersama yang harus diselesaikan.

## **5.2. Saran**

1. Disarankan agar program penanggulangan karhutla di berbagai daerah di Indonesia bisa dilakukan dengan metode-metode dampingan berbasis partisipasi masyarakat. Proses ini memang tidak mudah, tetapi menjadi basis kuat untuk pencegahan karhutla di masa datang
2. Persoalan karhutla sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi masyarakat semata, namun juga dari sisi kebijakan dan peran unsur lain terkait, seperti perusahaan perkebunan, pemerintah, LSM, TNI Polri.
3. Disarankan ada tindaklanjut dalam bentuk evaluasi dan refleksi kegiatan yang kemudian bisa diteruskan dengan melakukan riset lanjutan di daerah lain

## Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2008). Pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat sebagai upaya mengatasi risiko dalam REDD. *Tekno Hutan Tanaman*, I(1), 11–22
- Bur, Rasuanto, (2005), *Keadilan Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Budiyanto, Heri, *Pendampingan Dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plpbk)*, *Jurnal Local Wisdom*, Volume: III, Nomor: I, Halaman: 34 - 40, Februari 2011
- Chaskin, J. Robert. (2001). *Building Community Capacity*. New York: Walter De Gruyter, Inc
- Chambers, Robert, (1987), *Pembangunan Masyarakat Desa*, penerjemah Pepe Sudrajat, LP3ES, Jakarta.
- Comstock, Donald E., (1980), *Method for Critical Research*, Washington State University, diterjemahkan oleh A. Mahmudi, Insist Press, Yogyakarta.
- Daniel, Moehar, (2005), *PRA Participatory Rural Appraisal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Insist Press, tanpa tahun, *Bahan Belajar, Belajar, dan Bekerja dengan Masyarakat*. Tidak diterbitkan
- Irfani, tanpa tahun, *Pendekatan Desa Partisipatif*, tidak diterbitkan
- Kartasasmita. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Khodijah, Nyayu, dkk, (2009), Laporan Penelitian Tim PAR IAIN Raden Fatah, *Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Songket Dusun V Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan*, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah, tidak diterbitkan.
- Mahmudi, Ahmad, (2008), *Prinsip Dasar PAR*, makalah dalam Workshop Intensif PAR untuk Dosen PTAI Se-Indonesia, Karang Anyar.
- , *Suplemen Bacaan Workshop Nasional PAR kerjasama STAIN Surakarta dan Ditperta Depag RI*, 21 – 26 September 2002, Surakarta.
- , (2002) *Pemberdayaan Masyarakat*, LPTP dan FISIP Univ. Sebelas Maret, Surakarta
- Geovani Meiwanda, *Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, Nomor 3, Maret 2016
- Mustangin , Desy Kusniawati , Nufa Pramina Islami , Baruna Setyaningrum , Eni Prasetyawati, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji*, *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No.1, Desember 2017
- Nandika, Dodi. (2005). *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Nikmat, Harry, (2004), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Novra, A., & Fazrias. (2008). *Kajian kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan Provinsi Jambi : Analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif*. Jambi: Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
- Nuryasin, (2011), <https://grobogan.go.id/info/artikel/579-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-desa>

- Parillo, Vincent N, et. All, (1987), *Contemporary Social Problems*, Jhon Wiley and Sons, New York
- Prasojo, E. (2004). *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4(2): 10 –24.
- Rozaki, Abdul, (2016), *Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia*, Policy Paper, IRE, Yogyakarta
- Suyanto dalam Bernardus Sehan Kehik, *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)*, Agrimor 3 (1) 4-6 Jurnal Agribisnis Lahan Kering - 2018 International Standard of Serial Number 2502-1710
- Soetomo, (2008), *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Subekti, Priyo, Yanti Setianti, dan Hanny Hafiar, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Kawistara, Volume 8 No 2, Agustus 2018
- Sujatmiko, Budiman, *Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Undang-Undang Desa*, [http://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/01/Materi-Narsum-TIF-Seri-30-Pembangunan-Desa\\_Budiman-Sudjatmiko.pdf](http://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/01/Materi-Narsum-TIF-Seri-30-Pembangunan-Desa_Budiman-Sudjatmiko.pdf)
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta Bandung
- Sururi, Ahmad, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 1 – 25
- Saharjo, B., & Yungan, A. (2014). Pengaruh kebijakan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. *Jurnal Silviculture Tropika*, 05(2), 124–130.
- Subarudi. (2002). *Sistem kelembagaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan*. Sosial Ekonomi, 3 (1).
- Simorangkir, D., & Sumantri. (2002). *A review of legal, regulatory and institutional aspects of forest and land fires in Indonesia*. Bogor: Project FireFight South East Asia
- Thoha, A. (2014). *Model penguatan kelembagaan pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat*. (Tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Topatimasang, Roem, 2002, *Sebuah Surga Bernama Debut*, Laporan Penelitian, Sekolah Transformasi Sosial, Perdikan Insist, Yogyakarta.
- Widiono, Irkham dan Sarmin, *Pemberdayaan Peternak Marginal: Studi Kasus di Wilayah Banguntapan Bantul*, Indonesian Journal of Community Engagement Vol. 02, No. 02, Maret 2017
- Yenrizal, (2008), *Laporan hasil proses pemetaan awal PAR di Dusun Kemengan, Desa Wonokeling, Jatiyoso, Jawa Tengah*, Tim PAR IAIN Raden Fatah dalam rangka Workshop Metodologi PAR dosen PTAI se-Indonesia, 16 Mei-5 Juni 2008
- , (2015), *Komunikasi Lingkungan Petani Pedesaan, Studi pada Desa Swarna Dwipa, Kecamatan Semende Darat Ulu, Sumatera Selatan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Komunikasi, UNPAD, Bandung.
- Laporan Satgas Karhutla Sumatera Selatan, tahun 2016

[https://www.bappenas.go.id/files/5113/5078/6523/07herry\\_\\_20091014132804\\_\\_2268\\_\\_0.doc](https://www.bappenas.go.id/files/5113/5078/6523/07herry__20091014132804__2268__0.doc)

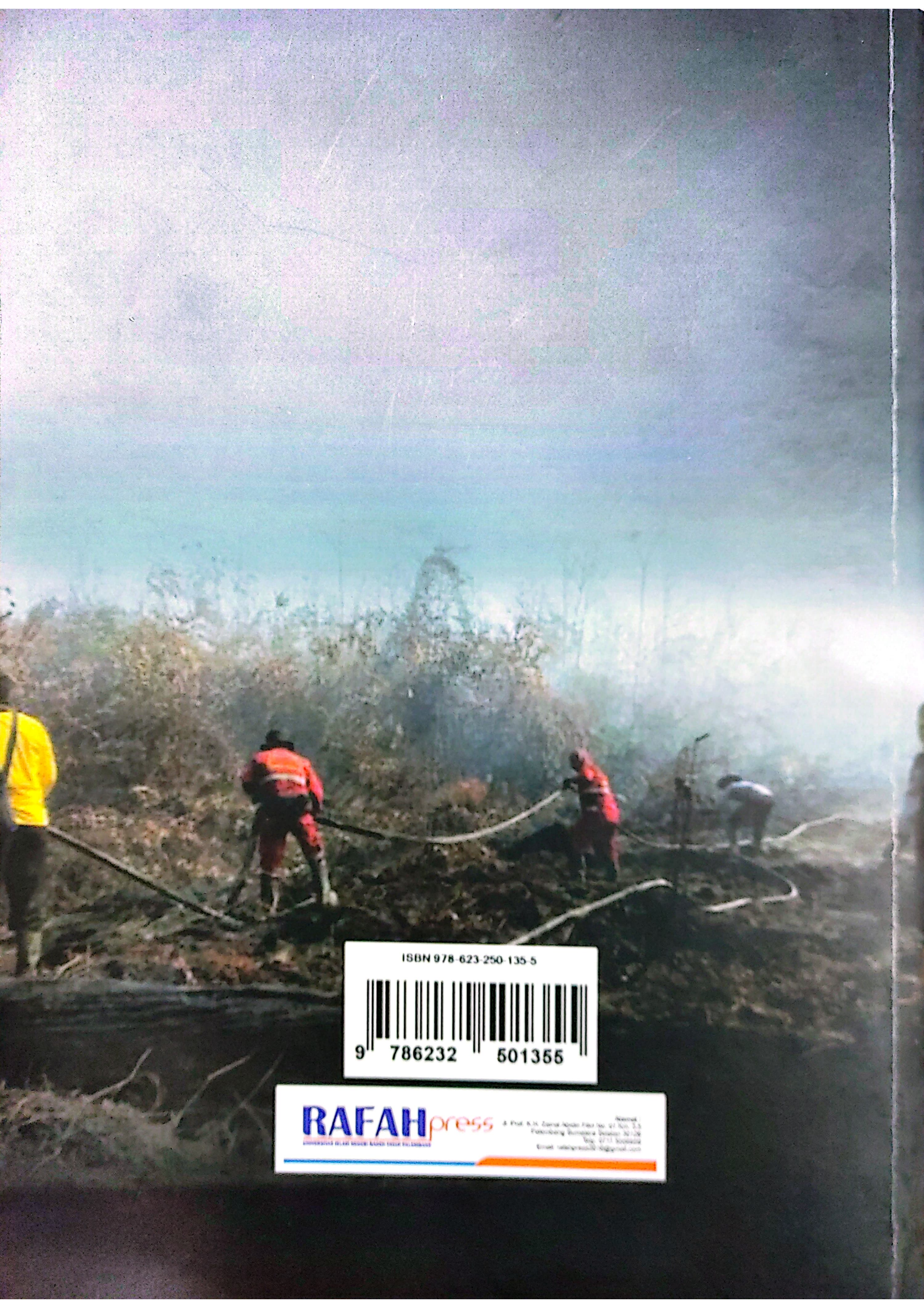
<https://gapki.id/news/1813/memahami-dan-mencari-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan>

[https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-038i.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf)

<https://nasional.kontan.co.id/news/bnpb-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-99-karena-ulah-manusia>

<http://walhijatim.or.id/2019/08/kebakaran-hutan-dan-lahan-sebagai-konsekuensi-kerusakan-ekologi/>

<http://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf>



ISBN 978-623-250-135-5



9 786232 501355

**RAFAH**press

Alamat :  
Jl. Prof. K.H. Zuhri Ar-Ranir, No. 97, Blok. 3,3  
Pasar Minggu, Kecamatan Duren Tiga, Jakarta Selatan 12120  
Telp. 021-7399422  
Email: rafahpress@indigmail.com